

# **STUDI EKSPLANATIF KEBIJAKAN TIONGKOK MEMIMPIN PERUBAHAN REZIM MONETER INTERNASIONAL DALAM TEORI STABILITAS HEGEMONI**

**Zubaidah**

Universitas Abdurrah  
zubaidah@univrab.ac.id

## ***Abstrak***

Keharusan untuk tunduk pada yuridiksi Amerika Serikat saat menggunakan dollar membuat banyak negara didunia terutama Tiongkok menginginkan perubahan pada rezim moneter Internasional, yaitu dengan membentuk gerakan de-dollarisasi. Tiongkok yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar dunia mendorong negara lain untuk meninggalkan dominasi dolar pada perdagangan dunia. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kebijakan dan kepentingan ekonomi politik Tiongkok untuk merubah rezim moneter internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif dan pengumpulan data berbentuk sekunder dari berbagai sumber website ataupun berita yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sudah dipublikasikan. Penelitian Ini menggunakan teori Stabilitas Hegemoni dari Robert Gilpin, teori ini beragumen bahwa sistem internasional dibangun oleh negara hegemon untuk memajukan serangkaian kepentingan ekonomi dan politiknya. Hasil yang didapat pada penelitian ini, kebijakan de-dollarisasi yang dilakukan Tiongkok adalah dengan mengurangi penggunaan dolar baik sebagai alat transaksi perdagangan maupun pada cadangan devisanya. Tiongkok juga mengajak negara lain untuk meninggalkan dolar dalam transaksi bilateral selain itu Tiongkok juga gercar menginternasionalisasikan yuan pada perdagangan dunia. internasionalisasi yuan oleh Tiongkok dipandang sebagai upaya untuk menjadi yuan mata uang utama internasional untuk mengantikan posisi dominasi dolar Amerika Serikat..

**Kata kunci** : De-dollarisasi, Hegemoni, Amerika Serikat, Rezim Moneter Internasional, Tiongkok

## **PENDAHULUAN**

Rezim internasional adalah serangkaian prinsip, norma, aturan-aturan dan proses pembuatan keputusan baik bersifat implisit maupun eksplisit dimana semua harapan aktor terkumpul dalam hubungan internasional (Krasner, 1983: 2). Prinsip dan aturan dalam rezim internasional berfungsi memberikan informasi kepada negara dalam upaya mengurangi berbagai ketidakpastian sistem internasional yang sewaktu-waktu dapat berubah. Rezim Internasional membantu pemerintah ke dalam interaksi yang berkelanjutan satu sama lain, dengan mengurangi insentif melakukan kecurangan dan meningkatkan nilai reputasi (Keohane, 1984: 245).

Rezim internasional juga memberikan informasi dalam pembentukan pasar. Ketika pasar muncul individu sudah memiliki informasi yang lengkap dan menjadi aktif dalam mengambil tindakan yang paling menguntungkan. Produsen individu dan konsumen biasanya cukup responsif terhadap sinyal harga, dan ini akan menciptakan ekonomi yang fleksibel dimana setiap perubahan harga relatif akan menyebabkan perubahan dalam pola-pola produksi, konsumsi dan institusi ekonomi (Gilpin, 1987: 28 ).

Sebagaimana dalam ekonomi politik domestik, sebuah infrastruktur internasional diperlukan untuk mengatur perdagangan luar negeri dan menstabilkan ekonomi internasional, biasanya negara yang relatif besar akan menanggung biaya yang tidak proporsional dalam penyediaan infrastruktur (Lake, 1988: 34). Seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi dan lainnya, menyebabkan perubahan distribusi kekuatan dan kepentingan dari aktor yang terlibat didalam sistem internasional. Karena kepentingan aktor berbeda-beda, maka sistem dibuat berdasarkan kepentingan khusus yang mencerminkan kepentingan aktor dengan kekuatan relatif sebagai perwakilan dari kepentingan aktor lainnya. Ini

mengakibatkan aktor-aktor yang paling diuntungkan dari perubahan dan yang mendapatkan kekuatan untuk melakukan perubahan tersebut akan berusaha untuk mengubah sistem dan membangun sistem yang baru dengan cara yang menguntungkan kepentingannya (Gilpin, 1981: 9).

Adapun kasus Perubahan sistem setelah terjadinya perubahan distribusi kekuasaan dalam sistem Internasional, ditunjukkan oleh kebijakan Inggris, sebagai hegemon pasca Perang Napoleon, menetapkan Poundsterling sebagai alat tukar internasional, nilai mata uang dipatok berdasarkan cadangan emas, penurunan tarif perdagangan dunia secara unilateral, dan rezim investasi. Sedangkan kasus lainnya ditunjukkan oleh kebijakan Amerika Serikat, Hegemon pasca Perang Dunia II, pada Perjanjian Bretton Woods tahun 1944. Bretton Woods bertujuan menciptakan sistem pertukaran mata uang yang efisien yang menguntungkan semua negara. Penetapan dollar sebagai alat tukar internasional karena dalam pertemuan Bretton woods hanya Amerika Serikat memiliki cadangan emas yang banyak dibandingkan negara lain, yaitu tiga perempat atau 70% dari cadangan emas dunia. Amerika Serikat juga menjamin bahwa dollar bisa ditukar dengan emas (Wan, 2018).

Dewasa ini, banyaknya negara yang terlibat dalam perdagangan dunia membuat dollar semakin banyak digunakan dibandingkan dengan mata uang lainnya, Hal itu membuat banyak negara ketergantungan juga dalam menggunakan mata uang dolar sebagai alat transaksi yang sah. Selain itu, karena nilai dolar cenderung lebih stabil dibandingkan mata uang lainnya maka tidak mengherankan jika banyak pelaku pasar memilih dolar sebagai alat untuk berinvestasi. Namun Menggunakan dollar membuat negara lain harus tunduk pada aturan yang berlaku di Amerika Serikat. Seperti yang dikatakan Anne Korin, co-director di think tank energi dan keamanan dari *institute for Analisis of Global Security*, ketika dollar Amerika Serikat

digunakan atau transaksinya diselesaikan melalui bank Amerika Serikat, maka entitas harus tunduk pada yuridiksi Amerika Serikat. Bahkan, meski transaksi tidak ada hubungan dengan Amerika Serikat. Selain itu Amerika Serikat kerap kali melakukan kebijakan yang merugikan perekonomian negara lain, seperti : Kebijakan proteksionis, Memberi sanksi ekonomi finansial kepada negara, pejabat, hingga individu dari negara lain yang dianggap melakukan kebijakan berbeda atau bermasalah secara hukum internasional. Sanksi itu bisa larangan transaksi keuangan dan perdagangan, pembekuan aset hingga larangan visa untuk pejabat tinggi negara tertentu (Sebayang, 2019).

Hal inilah yang membuat banyak negara menginginkan perubahan dalam sistem internasional yaitu pada rezim moneter Internasional, terutama Tiongkok sebagai negara yang terlibat dalam perang dagang akibat kebijakan Proteksionis dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sebagai upaya menghindari ketergantungan akan dolar dan pengaruh Amerika Serikat didunia, Tiongkok berupaya mengurangi ketergantungan akan dollar yang merupakan tonggak kekuatan ekonomi Amerika Serikat, yang dikenal dengan kebijakan de-dollarisasi. Untuk menjalankan kebijakan ini Tiongkok mendorong penggunaan mata uang yuan melalui berbagai inisiatif, seperti : *Shanghai Futures Exchange* Tiongkok bursa minyak mentah berjangka pertama di Shanghai yang berdenominasi yuan dan *Belt and Road Initiative* dalam transaksi bilateral. Turki merupakan salah satu negara yang memulai transaksi perdagangan dengan yuan. Perusahaan Turki diberbagai sektor membayar tagihan impor mereka dari Tiongkok menggunakan yuan melalui Bank terkait. Selain itu Tiongkok juga mulai melobi Rusia melalui eksekutif Tiongkok pada konferensi Russia calling di Moskow untuk menggunakan yuan sebagai alat pembayaran investasi. sayangnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menolak

permintaan Tiongkok, menurut Putin Yuan memiliki batasan karena konvergibilitas dan Tiongkok menyatakan masih terlalu dini bagi mereka untuk menerapkan liberalisasi pasar penuh seperti halnya Rubel (Mangkuto, 2019). Namun pada bulan Maret sampai Mei 2018 Rusia melakukan de-dollarisasi dengan melepaskan obligasi pemerintah Amerika Serikat sebesar US\$ 81 miliar (Rp 1.166,4 triliun) atau sekitar 84% dari total kepemilikan kala itu (Pransuamitra, 2020).

## STUDI LITERATUR

Terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa studi terdahulu sebagai acuan perbandingan dan referensi. Selain itu studi terdahulu juga digunakan untuk memastikan bahwa penelitian penulis merupakan penelitian yang berbeda atau tidak memiliki kesamaan fokus pembahasan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Pertama, Skripsi Dimas Dwi Santoso, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung tahun 2018, yang berjudul **“Stabilitas Hegemoni Amerika Serikat di tengah hadirnya pengaruh Tiongkok pasca lahirnya inisiasi One Belt One Road”**. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif alur logika deduktif sebagai pengujian dari teori Stabilitas Hegemoni. Berdasarkan penelitian Santoso didapatkan dua faktor dalam menentukan hegemoni dominan Amerika Serikat ditengah hadirnya Tiongkok pada tahun 2010, yaitu faktor *Hegemoni Influence* dan faktor bantuan Finansial dan hutang negara.

*Hegemoni Influence* merupakan kondisi agregat dari bantuan angkatan militer, persenjataan militer, selisih ekspor-impor, bantuan finansial dan hutang negara, nilai investasi, serta bantuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keenam faktor tersebut terbukti berpengaruh signifikan dalam

mengkategorikan negara mitra kedalam kategori hegemoni dominan Amerika Serikat dan Tiongkok ditahun 2010 dan 2015. Dampaknya, kecil dan besarnya pengaruh Tiongkok melalui strategi *economic prebalancing*-nya melalui *One Belt One Road* (OBOR) berpengaruh terhadap bergeser atau tidaknya negara mitra dari hegemoni dominan Amerika Serikat. Penyediaan dan performa bantuan finansial dan hutang negara merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan tingkat hegemoni Amerika Serikat dan Tiongkok di negara mitra. Dampaknya, kecil atau besarnya pengaruh Amerika Serikat dan Tiongkok di sektor ini akan menentukan tingkat terpilihnya hegemoni dominan di negara mitra (Santoso, 2018).

Kedua, penelitian Dewi Masitoh, Jurusan Hubungan Internasional, universitas Islam Indonesia tahun 2018 yang berjudul “**Upaya pertahanan Hegemoni Amerika Serikat dalam Menghadapi Dominasi Tiongkok pada periode presiden Barack Obama**”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang menjelaskan upaya pertahanan hegemoni Amerika Serikat dalam menghadapi dominasi Tiongkok yaitu dalam sektor ekonomi dan militer pada periode presiden Barack Obama berdasarkan Konsep Hegemoni menurut Antonio Gramsci.

Hasil yang didapatkan dari penelitian Dewi Masitoh ini, Amerika Serikat mempertahankan Hegemoninya pada sektor militer, Pertama, anggaran belanja militer, pasukan, pelaratan persenjataan dan kekuatan militer berdasarkan *land forces* dan *manpower*. Kedua, adanya kesepakatan JCPOA yang telah diprakarsai oleh Amerika Serikat, yang didalamnya terdapat Tiongkok juga mendorong agar kesepakatan ini dapat dilaksanakan. Ketiga, adanya pertahanan hegemoni Amerika Serikat dalam bidang militer di kawasan Asia Tenggara dengan memberikan beberapa dukungan terhadap militer anggota ASEAN. Dalam sektor ekonomi adanya kebijakan “*Pivot to Asia*”, dimana dari implementasi dari kebijakan tersebut

adalah pembentukan Trans Pacific Partnership (TTP). TTP ini dibentuk agar dapat menghambat aktivitas Free Trade Agreement (FTA) Tiongkok serta membuat pengaruh ekonomi Tiongkok menjadi lemah di wilayah regional maupun global. Selain itu Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan luar negeri dengan memberlakukan peraturan perdagangan terhadap Tiongkok (Masitoh, 2018).

Ketiga, Penelitian Aditya Witono, jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, tahun 2015, yang berjudul "**Upaya BRICS dalam menghadapi Hegemoni Amerika Serikat di perekonomian global melalui Lembaga Keuangan Internasional 2013-2014**". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif dengan menggunakan teori Hegemoni dari Antonio Gramsci. Yang menggambarkan kedudukan dan kelebihan BRICS terhadap hegemoni Amerika Serikat dalam perekonomian global, serta upaya BRICS sebagai penyeimbang dominasi Amerika Serikat.

Aditya Witono menyimpulkan bahwa krisis Keuangan di Amerika Serikat tahun 2007 yang disebabkan kredit macet di sektor perumahan murah (*Subprime Mortgage*), menjadi sebuah momentum penurunan hegemoni ekonomi Amerika Serikat. Dimanfaatkan oleh BRICS untuk mengkonfigurasi system internasional yang semula unipolar ke multipolar, yang sesuai dengan tujuan awal pembentukan BRICS. BRICS yang sadar akan dominasi Amerika Serikat di lembaga keuangan internasional (IMF dan World Bank) kemudian membentuk *New Development Bank* dan *Contingent Reserve Arrangement* untuk memecah dominasi Amerika Serikat di lembaga keuangan tersebut. Hal tersebut dipandang positif sebagai langkah awal untuk meng-counter hegemoni Amerika Serikat di perekonomian global agar negara-negara berkembang tidak lagi ketergantungan pada IMF dan World Bank yang syarat dengan kepentingan Amerika Serikat (Witono, 2015).

Selain penelitian dari skripsi, penulis juga mengambil referensi berupa jurnal. Pertama, Jurnal Annisa Nadya et.al, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia dengan judul **“Tiongkok sebagai Pemimpin Dunia Baru Melalui Investasi Negara-Negara di Dunia”**. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Tiongkok menjadi pemimpin dunia baru, Dengan Metode *The World Leadership* dan investasi. Annisa Nadya et.al, menyimpulkan bahwa dengan investasi yang dilakukan Tiongkok yang bukan hanya dinegara berkembang tetapi juga dinegara maju seperti Amerika Serikat. Hal tersebut menandakan jika Tiongkok telah memperluas pengaruhnya di dunia dan menjangkau segala lapisan negara (negara maju atau berkembang). Power Tiongkok akan terus meningkat seiring dengan investasi yang terus tumbuh. Afrika, Asia, Eropa, Australia maupun di Amerika, Tiongkok hadir dengan investasinya di berbagai sektor.

Selain itu Tiongkok juga merupakan negara terbesar di kawasan Asia Pasifik dan salah satu negara keempat terluas di dunia, setelah Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduknya yang saat ini mencapai sekitar 1,3 milyar jiwa merupakan yang terbanyak di dunia, serta dapat dikategorikan sebagai negara terpadat di muka bumi ini. Berdasarkan kondisi ini, terutama dalam hal jumlah penduduk dan luas wilayahnya, Tiongkok memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan perekonomiannya, bahkan perekonomian Tiongkok dapat dilihat sebagai sebuah kekuatan ekonomi dengan skala satu benua bukan pada skala satu negara. Kebangkitan Tiongkok yang luar biasa pesat, terutama di bidang ekonomi, mampu membuat Tiongkok menjadi negara terkemuka atau terpadang di dunia (Nadya Annisa, 2018).

Kedua, Jurnal Khakimatul Khoiriyah dari Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada tahun 2020 dengan judul **“Tiongkok: Analisa Balance Of Power dalam Perang Dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok pada Tahun 2018”**. Berdasarkan Teori Balance of Power yang digunakan Khakimatul Khoiriyah menjelaskan perang dagang yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan upaya Tiongkok untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat dengan memanfaatkan kekuatan material (*hard power*) yang meliputi kekuatan militer dan strategi pertahanan-nya dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi tinggi seperti *artificial intelligence*, selain itu kekuatan laten (*soft power*) seperti pertumbuhan ekonomi yang didorong dengan inisiasi proyek Made In Tiongkok 2025 dan *Belt and Road Initiative* yang mana kedua program tersebut memfokuskan pada peningkatan produksi dibidang jasa dan penggunaan teknologi tinggi untuk mendukung penghematan energi dan inovasi-inovasi lainnya, Tiongkok berusaha menyeimbangkan kekuatan *great power* Amerika Serikat dengan tetap terus melakukan peningkatan kekuatan secara domestik dan membangun aliansi dengan beberapa negara berkembang lainnya untuk menyeimbangkan pengaruh dan kekuatan yang dimiliki Amerika Serikat. Sebaliknya sebagai upaya untuk mencegah Tiongkok sebagai hegemon, Amerika Serikat melakukan manuver-manuver seperti kebijakan proteksi yang mengarah pada perang dagang untuk menghambat kemajuan dan menghambat inisiasi Tiongkok dimasa depan (Khoiriyah, 2020).

Ketiga, Jurnal Istanul Badiri Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, tahun 2020 dengan judul **“Analisis Ekonomi Politik Internasional dalam Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok Periode 2018-2019”**. Pada penelitian ini Istanul menggunakan konsep *Ekonomi*

*Politik Internasional* dengan hasil bahwa perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok berkaitan dengan bidang perdagangan dalam rangka mencapai kepentingan nasional masing-masing negara. Amerika Serikat dengan kepentingan untuk menstabilkan neraca perdagangan bilateral dengan Tiongkok yang telah deficit semenjak tahun 2011 dan membawa Tiongkok kepada forum negosiasi untuk membahas dugaan pelanggaran HAKI yang dilakukan oleh perusahaan dan teknologi asal Amerika Serikat (Badiri, 2020).

Keempat, penelitian Eryan Tri Ramadhani, 2011, UPN Veteran Surabaya, dengan judul “**Internasionalisasi Yuan: Transisi Tiongkok Menuju Kekuatan Hegemon**”. Eryan Tri Ramadhani menjelaskan tahap Tiongkok untuk menginternasionalisasi yuan untuk menjadi negara hegemon, yaitu melalui lokalisasi, Regionalisasi, dan Internasionalisasi. Dengan penjelasan Perubahan dalam sistem internasional ditandai oleh munculnya Tiongkok sebagai *rising power* dan *declining hegemon* Amerika Serikat yang menunjukkan adanya distribusi power di antara keduanya. Upaya yang dilakukan oleh Tiongkok melalui internasionalisasi yuan berkaitan erat dengan sebuah perubahan yang dimulai dari sistem moneter internasional. Dengan menjadi negara yang memiliki mata uang nasional berstatus internasional, Tiongkok akan mendapatkan power yang lebih besar baik dalam sistem moneter maupun sistem internasional lainnya. Inggris dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa peran dominan poundsterling dan dolar mampu menjamin status hegemon mereka serta menunjang pencapaian kepentingan nasional keduanya. Atas dasar inilah Tiongkok mengambil keputusan untuk menjadikan yuan sebagai mata uang internasional, di mana hal ini tidak hanya berimplikasi pada peningkatan power terhadap negara lain dalam sistem, tetapi juga pada pemenuhan ambisi Tiongkok untuk menjadi hegemon (Ramadhani, 2011).

Berdasarkan penelitian diatas, menunjuk bagaimana pengaruh Tiongkok pada dunia Internasional sebagai kekuatan ekonomi dunia dan usahanya untuk menjadi kekuatan baru dunia. Pada penelitian ini penulis akan meneliti kebijakan baru Tiongkok untuk merubah rezim moneter internasional untuk menjadi kekuatan baru dunia dengan melakukan kebijakan de-dollarisasi yang dianggap mampu menurunkan pamor Amerika Serikat didunia. Penelitian penulis ini akan menjelaskan bagaimana kebijakan de-dollarisasi yang dibuat Tiongkok akan merubah rezim Internasional dan kepentingan ekonomi politik Tiongkok dengan menggunakan teori Stabilitas Hegemoni dari Robert Gilpin.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi (Sugiyono, 2009 :9).

## **PEMBAHASAN** (Huruf kapital, Cetak Tebal/Bold, Arial 12, Rata Kiri)

Pembahasan pada bab ini merujuk pada argumen teori stabilitas hegemoni yang berargumen bahwa sistem internasional dibangun oleh negara hegemon untuk memajukan serangkaian kepentingan ekonomi dan politiknya.<sup>1</sup> Kepentingan sendiri didefinisikan sebagai usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain (Platonova, 2019 : 72). Dalam konteks ekonomi khususnya rezim moneter, kepentingan negara hegemon adalah membangun kekuatan negara. Untuk memperoleh kekayaan dan kekuatan dibutuhkan alat, yaitu perdagangan internasional. Para merkantilis yang menitik beratkan kepada keamanan negara berpendapat bahwa negara dan pasar merupakan dua hal penting untuk menciptakan dan mempertahankan keamanan negara (Batubara, 2019 : 3).

Berangkat dari argumen di atas, maka kepentingan ekonomi politik Tiongkok adalah sebagai berikut:

#### **4.1 Menghindari Sanksi Ekonomi Amerika Serikat**

Saat ini, akses ke jaringan global adalah sumber kekuatan yang sangat penting. Akan tetapi, ketergantungan yang besar terhadap jaringan global juga berakibat pada kerentanan. Karena sumber kekuatan tersebut mengalir dari pusat kekuatan, yang merupakan terminal utama yang menghubungkan berbagai jaringan disekitarnya. Ancaman berupa penolakan akses kedalam jaringan tersebut merupakan sanksi berat bagi setiap negara yang tidak disukai oleh pusat kekuasaan. Tetapi kalau kekuatan yang diamanatkan kepada pusat kekuasaan disalahgunakan, dimana kebergantungan yang tidak seimbang dijadikan sebagai senjata untuk mencapai tujuan. Maka peserta yang tadinya masuk dalam jaringan

tersebut akan menciptakan jaringan alternative sendiri yang akan merubah jaringan yang sudah ada

Kondisi inilah yang sedang terjadi kepada negara-negara besar dunia terhadap Amerika Serikat, yang melakukan de-dollarisasi. Alasannya adalah keharusan untuk tunduk pada yuridiksi Amerika Serikat ketika bertransaksi menggunakan dolar Seperti yang dikatakan Korin co-director di think tank energy dan keamanan dari *institute for Analysis of Global Security* ketika dolar Amerika Serikat digunakan atau transaksinya diselesaikan melalui bank Amerika Serikat, maka entitas harus tunduk pada yuridiksi Amerika Serikat, bahkan meski transaksi tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat. Selain itu Amerika Serikat kerap kali menjatuhkan sanksi ekonomi sepihak terhadap pihak lain yang tidak hanya berdampak pada negara tertentu tetapi mencangkup ekonomi. Seperti, Kebijakan proteksionis, Memberi sanksi ekonomi finansial kepada negara, pejabat, hingga individu dari negara lain yang dianggap melakukan kebijakan berbeda atau bermasalah secara hukum internasional. Sanksi itu bisa larangan transaksi keuangan dan perdagangan, pembekuan aset hingga larangan visa untuk pejabat tinggi negara tertentu (Sebayang, 2019).

Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar didunia, Tiongkok merupakan negara yang tidak luput dari sanksi ekonomi negeri penguasa Amerika Serikat. Terutama pada masa Presiden Donald Trump. Selain kebijakan proteksionis dengan memberlakukan tarif impor pada produk dari Tiongkok yang menyebabkan terjadinya perang dagang antar kedua negara tersebut. Pada tanggal 8 Maret 2018, Amerika Serikat menetapkan tarif impor beberapa produk terkhusus baja dan aluminium yang masing-masing sebesar 25% dan 10%. Kemudian pada tanggal 6

Juli 2018, Amerika Serikat kembali menerapkan tarif sebesar 25% dengan nilai \$34 miliar terhadap produk-produk Tiongkok.

Namun, Tiongkok tidak tinggal diam Pada tanggal 2 April, Tiongkok meningkatkan tarif impor Amerika Serikat sebesar 15% sampai 25% yang dinilai mencapai sekitar \$3 miliar yang secara garis besar Tiongkok menargetkan produk – produk agrikultur yang berasal dari Amerika Serikat (Batubara, 2019 : 2). Negara lain yang diberlakukan tarif impor oleh Amerika Serikat adalah, Uni Eropa, Meksiko, Kanada, Turki, dan India. Akibat kebijakan proteksionis Amerika Serikat ini, membuat perekonomian dunia melambat. Amerika Serikat juga memberikan sanksi keuangan dan perjalanan pada 7 Desember 2020 terhadap 14 anggota Kongres Tiongkok atas tuduhan peran mereka dalam mendiskualifikasi anggota legislatif terpilih dari kubu oposisi dalam pemilu Hongkong (Sekarwati, 2020).

Diantara mereka yang kena sanksi dari Amerika Serikat itu adalah Wakil Kepala Komite Kongres Nasional Tiongkok, yakni sebuah badan pengambilan keputusan tertinggi dilegislatif Tiongkok. Sebenarnya, kemampuan Tiongkok untuk membalas Amerika Serikat dibatasi oleh dominasi dolar Amerika Serikat dalam keuangan internasional. Greenback menyumbang jauh lebih besar di transaksi perbankan global. Hal itu mempersulit bank multinasional, termasuk memberi pinjaman yang dikelola pemerintah Tiongkok, untuk menghindari kepatuhan terhadap sanksi Amerika Serikat. Selain Tiongkok beberapa negara didunia juga pernah diberikan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat, diantaranya adalah Iran, sehingga menyebabkan Iran mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak 1980. Ada juga Korea Utara dan Rusia.

## **1. Iran**

Iran merupakan negara yang sering diberi sanksi oleh Amerika Serikat terkait pengembangan program nuklir yang dilakukannya hingga menyebabkan krisis berkepanjangan. Krisis menerpa Iran dimulai sejak tahun 1980 ketika Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dari negara-negara Barat menjatuhkan sanksi terhadap Iran, karena dianggap bersikeras mengembangkan program nuklir. Embargo berlanjut saat Amerika Serikat dipimpin Presiden Bill Clinton menambah rangkaian sanksi pada Iran, dengan menghentikan perdagangan dan melarang investasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Iran. Tahun 2015, saat Amerika Serikat dibawah presiden Barrack Obama, sanksi ekonomi mulai mengendur setelah kesepakatan tercapai antara Iran dengan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB menandatangani kesepakatan penghentian nuklir *The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* (Muhammad, 2020).

Hubungan Iran Amerika Serikat dan negara-negara Barat kembali memburuk ketika Donald Trump meraih kemenangan dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016. Trump menarik mundur Amerika Serikat dari kesepakatan karena menilai Iran masih menjalankan program nuklir namun dibantah oleh *The International Atomic Energy Agency (IAEA)* yang bertugas sebagai pengawas langsung Iran.

Kondisi Iran semakin memburuk karena Amerika Serikat mengancam akan mengenakan sanksi pada negara-negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut, yaitu Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok, Jerman, dan Uni Eropa, jika tetap melakukan transaksi bisnis dengan Iran. Karena Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi sekunder kepada siapa saja yang melakukan bisnis dengan Iran, yakni dengan menggunakan perangkat *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)*, yang berpusat di Belgia. Dalam tekanan Amerika

Serikat, SWIFT telah mengeluarkan bank-bank Iran dari sistem pembayaran global yang menjadi wewenangnya. Alhasil, kebijakan itu secara efektif membuat Iran terkucilkan dari sistem keuangan global. Sehingga Iran tidak dapat melakukan transaksi bisnis bahkan dengan negara-negara yang tidak kena sanksi dari Amerika Serikat (Winarno, 2019) .

Akibat rentetan embargo yang diberlakukan Amerika Serikat kepada Iran membuat pertumbuhan ekonomi Iran merosot hingga 3,7 persen pada tahun 2017. Dan tambahan sanksi ekonomi memicu krisis ekonomi dan sempat membuat negara Iran dilanda demo besar-besaran pada November 2019. Sebagai imbas sanksi baru, berdasarkan catatan IMF, GDP Iran menyusut sampai sekitar 4,8 persen pada 2018 dan diperkirakan kembali menyusut hingga 9,5 persen pada 2019 (Muhammad, 2020).

## **2. Korea Utara**

Adanya uji coba peluncuran senjata nuklir oleh Korea Utara menuai kecaman oleh dunia internasional termasuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Banyak resolusi dan sanksi yang telah diberikan kepada Korea Utara sejak pertama kali uji coba senjata nuklir diluncurkan yaitu pada masa pemerintahan Kim Il Sung. Resolusi yang dijatuhkan oleh DK PBB sebagai sanksi terhadap Korea Utara tersebut salah satunya Resolusi DK PBB 1718. Resolusi ini berisi tentang larangan untuk melanjutkan program pengembangan nuklir dan pelarangan jual beli senjata. Adapun beberapa negara yang ikut mengecam aktivitas yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Rusia, dan Korea Selatan yang keenam negara ini merupakan kelompok *Six Party Talks*. *Six Party Talks* (SPT) dibentuk pada tahun 2003 dengan memiliki satu tujuan yaitu untuk berusaha mengantisipasi pengembangan senjata nuklir Korea Utara dengan

menjadikan SPT sebagai sarana diplomasi multilateral dalam mengatasi isu pengembangan senjata nuklir tersebut. Sejak 2003, SPT telah mengadakan pertemuan sebanyak enam kali namun pada 2008 kelompok ini mengalami kegagalan (Meiliza, 2019).

Hal tersebut dikarenakan adanya tuduhan Amerika Serikat terhadap Korea Utara yang telah mengadakan program pengayaan uranium dan memulai kembali pengembangan uji senjata nuklir miliknya. Karena merasa kecewa atas sikap Korea Utara yang tidak berkomitmen akan dialog-dialog yang pernah dilakukan sebelumnya dalam pertemuan *Six Party Talks* maka kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara pun mengalami kegagalan karena tidak mencapai tahapan verifikasi.

Amerika Serikat di bawah pemerintahan George Bush yang gagal mencapai kesepakatan dalam SPT terus berupaya agar Korea Utara menghentikan program pengembangan nuklirnya. Hal tersebut ditunjukkan Amerika Serikat di bawah pemerintahan baru yaitu Barack Obama yang menerapkan kebijakan *Strategic Patience* (Strategi Kesabaran) untuk menghadapi dan mengantisipasi perkembangan kekuatan nuklir yang dimiliki Korea Utara. Salah satu tindakan yang dilakukan dalam kebijakan *Strategic Patience* adalah memberikan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara. Sanksi ekonomi dianggap paling ampuh untuk membuat Korea Utara dapat melakukan denuklirisasi. Namun setelah menjabat selama dua periode, kebijakan *Strategic Patience* Barack Obama tidak membuahkan hasil. Pada 2017 Amerika Serikat mengalami pergantian pemerintahan. Adalah Presiden Donald Trump dari Partai Republik yang terpilih. Isu nuklir Korea Utara tentu tidak luput dari fokus pemerintahan Donald Trump (Meiliza, 2019)..

### **3. Rusia**

Pada tahun 2014 Amerika Serikat dan Uni Eropa pernah memberikan sanksi terhadap Rusia atas tindakan Rusia yang melakukan intervensi di dalam krisis Ukraina dan aneksasi terhadap wilayah Krimea. Intervensi yang dilakukan oleh Rusia pada krisis Ukraina diawali dengan adanya demonstrasi penolakan pemerintahan baru Ukraina setelah menurunkan Presiden Ukraina, Victor Yanukovich, yang dilakukan oleh masyarakat etnis Rusia di wilayah Krimea, Ukraina pada bulan Februari 2014.

Aksi demonstrasi yang terjadi di Krimea mendapatkan perhatian dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan pada tanggal 26 Februari 2014, Putin memerintahkan untuk melakukan latihan militer di dekat perbatasan Ukraina. Sekitar 150.000 prajurit Rusia segera ditempatkan oleh pemerintah Rusia di perbatasan Rusia-Ukraina, bersebelahan dengan wilayah Krimea. Dampak dari penempatan militer Rusia di perbatasan Ukraina langsung mendapatkan perhatian parlemen Ukraina. Menurut parlemen Ukraina, tindakan yang dilakukan oleh Rusia telah melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina (Anggara, 2018).

Sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat diantaranya yakni: (1) Memberikan batasan akses pasar ke Barat dan pelayanan untuk perusahaan Rusia di sektor perbankan, energi dan sektor pertahanan, (2) Memberikan sanksi embargo terhadap ekspor Rusia, khususnya ditujukan untuk teknologi eksplorasi minyak dan alat produksi, (3) Memberikan sanksi embargo terhadap ekspor Rusia ditujukan sektor militer dan yang berkaitan. Uni Eropa juga memberikan tindakan serupa dan menganggap bahwa tindakan Rusia telah mengganggu stabilitas keamanan dan tidak menghargai kedaulatan Ukraina. Uni Eropa berfokus pada de-eskalasi krisis Ukraina dan membantu dalam upaya stabilitas, kesejahteraan dan demokratisasi di Ukraina. Uni Eropa juga memberikan respon atas intervensi Rusia di Krimea dan

memberikan sanksi yaitu: (1) Pengurangan kuantitas ekspor dan impor antara Rusia dan Uni Eropa dalam jangka panjang, (2) Ekspor produk-produk dari Rusia yang berhubungan dengan energi tertentu dan teknologi akan dikenakan otoritas dari pejabat berwenang Uni Eropa; (3) Semua perusahaan yang berasal dari Uni Eropa dilarang bekerjasama terhadap 5 bank negara milik Rusia yaitu Sverbank, VTB, Gazprombank, Vnesheconombank (VEB), dan Russian Agriculture Bank (Anggara, 2018).

Selain bank-bank, Uni Eropa juga melarang melakukan kerjasama dengan 3 perusahaan senjata milik Rusia yaitu Oboronprom, United Aircraft Corporation dan Uralvagonzavod. Uni Eropa juga melarang melakukan kerjasama dengan 3 perusahaan energi milik Rusia, yaitu Rosneft, Transneft dan Gazprom Neft. Sanksi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan efek negatif bagi perekonomian Rusia dan menyebabkan GDP Rusia mengalami penurunan hingga -2.8% pada tahun 2015 (Anggara, 2018).

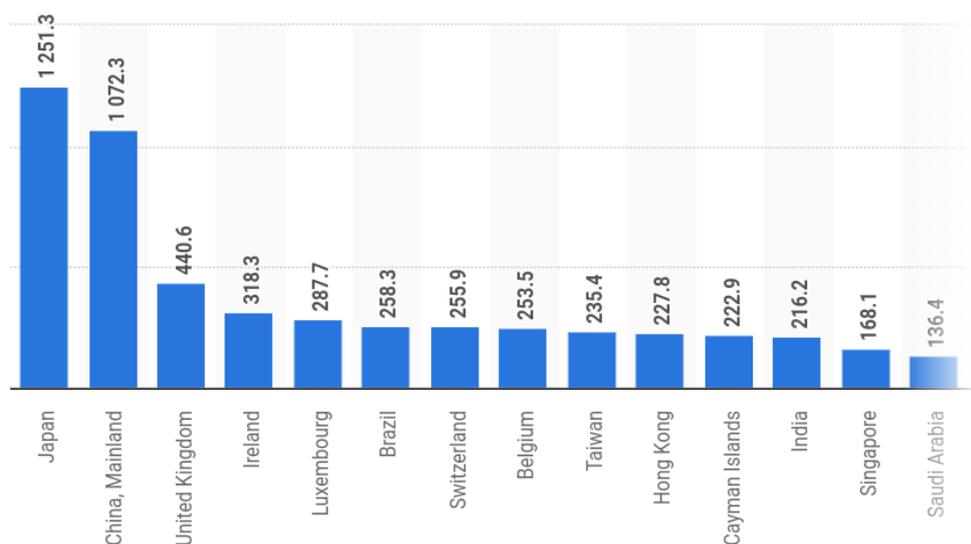
#### **4.2 Mengurangi Risiko Defisit Utang Amerika Serikat**

Saat ini Tiongkok merupakan negara pemilik obligasi terbesar kedua Amerika Serikat dibawah Jepang. Pada Desember 2020 total kepemilikan Tiongkok atas obligasi Amerika Serikat adalah US\$ 1,072.3 miliar (Grafik 6). Sebelumnya Tiongkok merupakan pemilik asing terbesar pertama atas obligasi Amerika Serikat. Tiongkok membeli obligasi pemerintahan Amerika Serikat tujuan untuk mengelola nilai tukar yuan.

Setiap negara yang terlibat dalam perdagangan dan investasi Internasional membutuhkan mata uang asing untuk membayar barang atau investasi asing diluar negeri. Akibatnya Tiongkok menyimpan mata uang asing sebagai cadangan untuk melindungi perekonomian dari perubahan pada sistem internasional secara tiba-tiba.

Kebijakan ekonomi domestik sering kali mengharuskan Bank sentral untuk menjaga rasio kecukupan cadangan devisa dan cadangan lainnya untuk utang luar negeri jangka pendek dan untuk memastikan kemampuan suatu negara untuk membayar utang luar negeri jangka pendeknya ketika terjadi krisis.

**Grafik 4.1 : Kepemilikan Obligasi Amerika Serikat Desember 2020 (dalam US\$)**

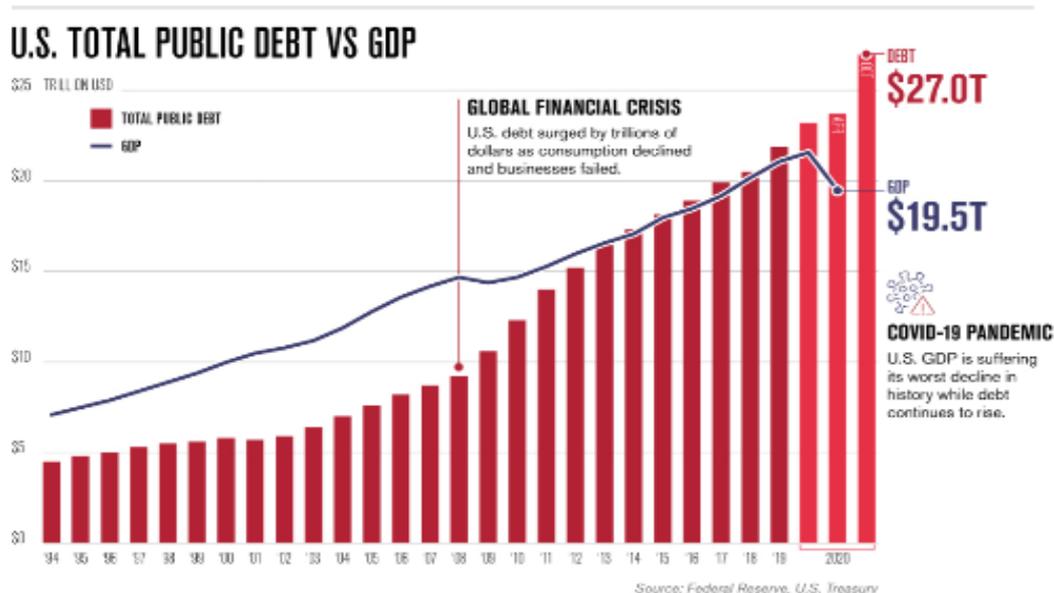


Sumber : [www.statista.com](http://www.statista.com)

Namun akibat memanasnya hubungan dagang antara kedua negara ekonomi terbesar ini, Tiongkok secara perlahan-lahan mengurangi kepemilikan atas obligasi Amerika Serikat. data US Treasury menunjukkan investor asal Tiongkok, baik swasta maupun pemerintahnya, tercatat sudah menjual US\$155,1 miliar sejak Januari 2014 hingga Maret 2019 (Arif, 2019). Mengurangi atas kepemilikan obligasi Amerika Serikat dilakukan Tiongkok untuk mendiversifikasi cadangan devisa kedalam mata uang lain, seperti euro dan Yen Jepang. Hal ini dilakukan Tiongkok guna menghindari sanksi dan tarif perdagangan dari Amerika Serikat. Selain itu de-dollarisasi juga dapat menghindari Tiongkok dari resiko defisit utang Amerika Serikat, karena Tiongkok sangat terekspos terhadap dolar Amerika Serikat dan aset

dalam mata uang dolar. Pelonjakan utang Amerika Serikat dari tahun ketahun yang kini mengalami defisit melebihi PDB negara. Utang nasional Amerika Serikat telah melonjak mencapai US\$27 triliun per Oktober tahun 2020 (Grafik 7) yang sudah mengalami defisit mencapai rekor 122% dari PDB per April 2020 (Tabel 2).

**Grafik 4.2 : Peningkatan Utang Amerika Serikat sampai Oktober 2020**



Sumber : [www.visualcapitalis.com](http://www.visualcapitalis.com)

**Tabel 4.1 : Utang Amerika Serikat vs PDB dari tahun 2014 - April 2020**

Year	Total Public Debt (USD)	GDP (USD)	Debt as % of GDP
2014	\$17.3T	\$17.1T	101%
2015	\$18.1T	\$18.0T	101%
2016	\$18.9T	\$18.5T	102%
2017	\$19.9T	\$19.2T	104%
2018	\$20.5T	\$20.2T	101%
2019	\$21.9T	\$21.1T	104%
2020	\$23.2T	\$21.6T	107%
April 2020	\$23.7T	\$19.5T	122%

Sumber : [www.visualcapitalis.com](http://www.visualcapitalis.com)

Defisit Amerika Serikat sudah membengkak dan semakin besar karena anggota parlemen mendorong paket stimulus untuk penanganan dampak pandemi

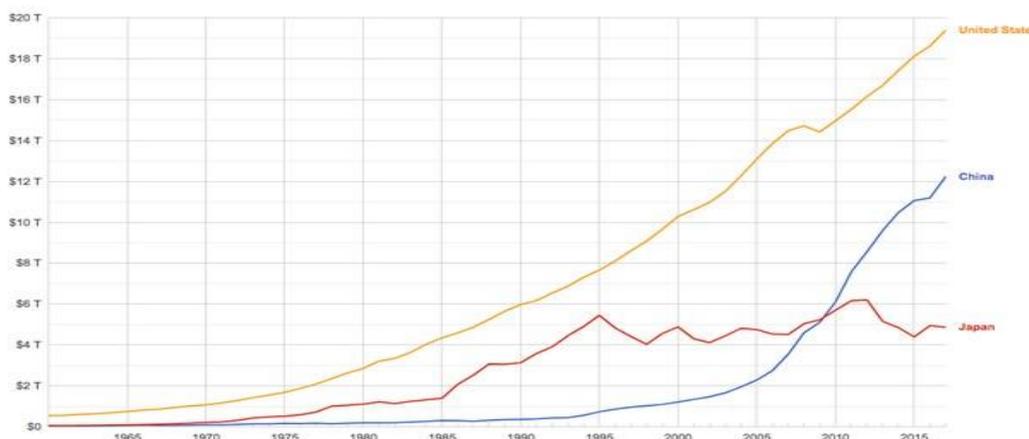
COVID-19. Biaya tambahan untuk mendanai pandemi harus melalui penerbitan lebih banyak obligasi Amerika Serikat. Paket bantuan pertama yang ditujukan untuk mengatasi pandemi yang menambahkan lebih dari \$ 2 triliun ke defisit yang sudah besar. Amerika Serikat menambah utang untuk kedua kalinya sebagai penanganan pandemi COVID-19 dan Bank sentral Amerika Serikat (*Federal Reserve*) dibulan Maret 2020, juga memangkas suku bunga acuannya sebesar 150 basis poin (bps) menjadi 0,25%, yang membuat perekonomian Amerika Serikat mengalami resesi. Defisit anggaran Amerika Serikat diperkirakan US\$3,3 triliun tahun 2020, yang juga berpotensi gagal bayar utang karena utang Amerika Serikat saat ini melonjak tajam melebihi Produk Domestik Bruto (PDB). Anggaran sebesar US\$3,3 triliun lebih dari tiga kali lipat dari kekurangan pada 2019 dan lebih dari dua kali lipat tingkat yang dialami setelah kehancuran pasar dan resesi hebat tahun 2008-2009. Pengeluaran pemerintah didorong oleh empat program penanganan COVID-19 yang mencapai US\$6,6 triliun meningkat US\$2 triliun dibandingkan anggaran tahun 2019. Hal ini sebuah tonggak sejarah yang akan menempatkan Amerika Serikat setelah Perang Dunia II ketika akumulasi utang melebihi ukuran ekonomi (Lu, 2020).

Selain itu pemerintah Amerika Serikat juga melontarkan stimulus moneter dengan pembelian aset dengan nilai tak terbatas dan stimulus fiskal triliunan dolar. Hal ini akan membuat jumlah uang dolar diperekonomian akan meningkat drastis. Secara teori nilai tukar, dolar Amerika Serikat akan mengalami pelemahan yang signifikan. Berdasarkan data dari IMF menunjuk total porsi dolar Amerika Serikat dalam cadangan devisa dunia terus mengalami penurunan dari 61,8% pada kuartal pertama tahun 2020 menjadi 61,2% pada kuartal II-2020 dan 60,4% pada kuartal III-2020 (Pransuamitra, 2020b).

#### **4.3 Menjadikan Yuan sebagai Mata Uang Utama Internasional**

Reformasi ekonomi yang dijalankan sejak era Deng Xiaoping tahun 1978 telah membawa perekonomian Tiongkok yang dulu terisolasi menjadi lebih terbuka. Ekonomi Tiongkok terus tumbuh dengan rata-rata 10% pertahun hingga menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia mengeser posisi Jepang sejak tahun 2010 hingga sekarang (gambar : 10). Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dalam sejarah. Dari tahun 1995-2002 China menyumbang 25% dari pertumbuhan ekonomi dunia, sedangkan Amerika Serikat menyumbang sebesar 20%. Sampai saat ini Tiongkok berhasil menyelinap Jerman sebagai negara eksportir terbesar di dunia, sekaligus sebagai negara yang memiliki cadangan devisa terbesar di dunia dengan angka lebih dari \$1 triiun (Ramadhani, 2011). Bahkan ekonom memprediksi ekonomi Tiongkok akan melesat melampaui Amerika Serikat pada 2030.

**Grafik 4.3 : Pertumbuhan ekonomi, Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang tahun 1965- 2015**



Sumber: Cnbc Indonesia

Setelah menjadi negara ekonomi terbesar dunia, Tiongkok semakin agresif untuk mengantikan posisi Amerika Serikat sebagai negara hegemon. Terlihat dari langkah-langkah yang dilakukan Tiongkok, seperti pertempuran perbatasan dengan India, melakukan militerisasi Laut Tiongkok Selatan, menekan Taiwan,

Mengkonfrontasi Jepang atas pulau-pulau yang disengketakan. Pada bidang ekonomi, Tiongkok genjar melakukan Internasionalisasi yuan melalui berbagai inisiatif (yang sudah penulis jelaskan pada bab 4). Dalam sejarahnya, mata uang Internasional memang menjadi pendukung kekuatan suatu negara. Sebuah negara dikatakan sebagai hegemon karena kapabilitasnya di segala bidang, termasuk moneter. Seperti Inggris, sebagai hegemon pasca Perang Napoleon, menetapkan Poundsterling sebagai alat tukar internasional dan Amerika Serikat, Hegemon pasca Perang Dunia II, yang menetapkan dolar sebagai alat tukar internasional pada Perjanjian Bretton Woods tahun 1944.

Bercermin dari negara hegemon sebelumnya Tiongkok juga menggunakan strategi yang sama, dengan cara menginternasionalisasikan yuan melalui komoditas pasar terbesar dunia dengan meluncurkan bursa berjangka minyak mentah yang bedominasi yuan di Shanghai. Peluncuran bursa berjangka minyak mentah berdominasi yuan yang diluncurkan Tiongkok ini, dapat memperluas cangkupan perdagangan menggunakan yuan baik komoditas minyak maupun komoditas lainnya. Karena semakin banyak perusahaan asing yang masuk ke Tiongkok semakin banyak negara memiliki rekening Bank dalam mata uang yuan. Uang itu tidak hanya akan digunakan sebagai alat bayar barang dan jasa produk Tiongkok, tetapi juga dapat digunakan untuk membeli obligasi dan saham pemerintahan.

Saat ini dolar Amerika Serikat mengalami penurunan pada cadangan devisa dunia akibat de-dollarisasi. Sejak abad ke-21 dimulai, banyak orang yang meragukan de-dollarisasi yang digerakkan oleh Tiongkok ini, karena mereka merasa pasar sangat bergantung pada dolar Amerika Serikat. Tetapi saat Amerika Serikat menambahkan utang untuk penanganan pandemi COVID-19 Hal ini meruntuhkan ekspektasi pasar terhadap dolar Amerika Serikat juga memicu kemajuan de-

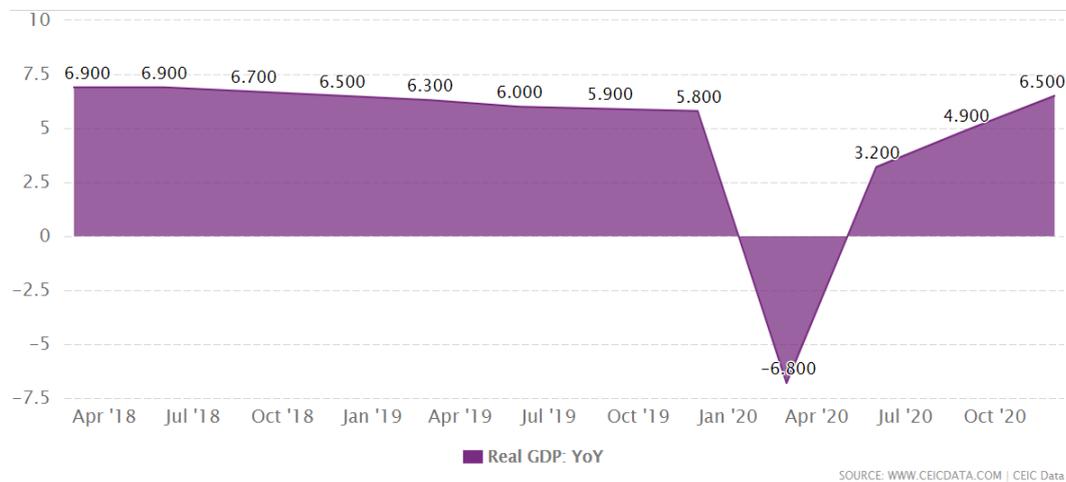
dolarisasi yang lebih cepat. Negara-negara didunia mulai mencari alternative lain untuk menjauhkan diri dari dolar Amerika Serikat.

Pelemahan dolar Amerika Serikat saat ini akan dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk menempatkan peran yuan pada mata uang dunia. Data Reuters juga menunjukkan, nilai tukar yuan naik sekitar 1,8% terhadap dolar Amerika Serikat. Sedangkan dolar Amerika Serikat melemah sekitar 1,3% terhadap mata uang SDR lainnya pada Agustus 2020 (Ramadhani, 2011). Ekonomi Amerika Serikat yang relatif bergantung pada investasi asing, di mana Tiongkok menjadi investor terbesar kedua bagi aset-aset sekuritas Amerika Serikat, memberi kesempatan pada Tiongkok untuk memiliki *bargaining power* terhadap Amerika Serikat. Perkembangan perdagangan menggunakan yuan saat ini menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Semakin banyak modal yang dikeluarkan dan penggunaan mata uang yang lebih fleksibel dan modal lintas batas yang lebih besar akan meningkatkan volatilitas mata uang secara alami.

Saat dolar mengalami pelemahan Tiongkok memantapkan posisinya dalam sistem internasional sebagai pemain yang patut diperhitungkan. Peran yuan mulai dipandang penting seiring dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang terus menunjukkan angka positif bahkan disituasi Pandemi Covid-19, disaat negara-negara dunia mengalami resesi, termasuk Amerika Serikat ( Grafik 9). Investor asing semakin beralih kepasar Tiongkok karena potensi keuntungan yang relatif lebih tinggi dari pada wilayah lain. Dengan investasi ini, akan lebih banyak lagi aset global yang disimpan dalam bentuk yuan. Selain itu yuan juga telah menyumbang sekitar 2% dari aset cadangan devisa global (Zuraya, 2020). Hal ini menjadi poin utama bagi Tiongkok untuk mendominasi sistem moneter internasional. Menggantikan dominasi dolar berarti pula menggantikan dominasi Amerika Serikat tidak hanya

dalam sistem moneter internasional, karena dolarlah yang selama ini menjamin Amerika Serikat untuk tetap mampu membiayai pengeluaran militer dan defisit neraca pembayaran yang dialami sejak tahun 1970-an.

**Grafik 4.4 : Pertumbuhan PDB Riil Tiongkok April 2018 - Oktober 2020**



Sumber : Ceicdata.com

Ketika posisi Amerika Serikat mulai lengser, Tiongkok akan berusaha menggunakan pengaruhnya yang sedang berkembang untuk menata ulang aturan dan dalam sistem internasional dengan menjadikan yuan sebagai mata uang utama internasional. Menjadi hegemon dalam sistem internasional memang mensyaratkan negara untuk memiliki mata uang yang berstatus internasional. Sebuah negara dikatakan sebagai hegemon karena kapabilitasnya di segala bidang, termasuk moneter. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa moneter kemudian menjadi tulang punggung bagi seluruh kapabilitas yang dimiliki hegemon. Seperti yang dikatakan Benjamin Cohen, “semakin kuat mata uang sebuah negara, semakin besar pula power yang dimiliki negara tersebut.” Hal ini pula yang dipercayai oleh Tiongkok. Yuan yang berstatus internasional tidak hanya membantu terjadinya perubahan dalam sistem internasional, tetapi juga menjadi salah satu instrumen yang mendukung Tiongkok menjadi negara hegemon baru dunia (Ramadhani, 2011).

Yang menjadi pertanyaan adalah saat Tiongkok berhasil menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai negara hegemon, apakah stabilitas dalam sistem tatanan internasional terjadi?. Menurut Lake sistem internasional selalu diidentikkan dengan sifat anarki, dimana kondisi tidak ada satupun perubahan yang terjadi mengarah pada kesimpulan bahwa umat manusia telah melampaui sifat dasar hubungan internasional. Politik dunia masih ditandai oleh perjuangan entitas politik untuk kekuasaan, dan kekayaan dalam kondisi anarki global. Anarki dan prinsip menolong diri sendiri (*self-help*) juga membentuk kepentingan nasional dengan cara lain. *Self help* menyebabkan, pertama negara hanya peduli dengan keuntungan nasional mereka dan bukan dengan kesejahteraan global. *Self-help* juga menyebabkan negara tidak hanya fokus pada setiap negara memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi produksi lebih baik dari negara lain (keuntungan absolut/ non zero sum games/ neoliberal ) mereka dari perdagangan tetapi juga dengan bukan hanya fokus kepada mendapatkan apa yang mereka mau namun juga mendapatkan keuntungan yang lebih dari aktor lain atau perbedaan antara keuntungan mereka dengan keuntungan negara lainnya (keuntungan relatif / zero sum games / neorealis). (Lake, 1988: 23).

Kedua, negara-negara yang mendapatkan keuntungan absolut dan relatif akan berusaha membangun rezim atau mekanisme control lain untuk memperkuat posisi menguntungkan mereka. Ketiga, negara negara yang kurang beruntung akan berusaha memperkuat posisi relatif mereka dalam pembagian kerja internasional dan mungkin bersedia menanggung biaya absolut jangka pendek untuk mencapai tujuan mereka. Pengejaran kekuasaan (*power*) sebagai konsekuensi dari anarki merupakan relasional konsep, peningkatan kekuatan sebuah negara berarti

kelemahan bagi negara lainya, kekayaan, disisi lain bersifat absolut. Keuntungan dan kerugian negara mereka sendiri merupakan perhatian dari pusat pengambilan kebijakan. (Lake, 1988: 23).

Begitu juga yang akan terjadi saat Tiongkok menjadi negara hegemon, Tiongkok akan berusaha menggunakan pengaruhnya untuk menata ulang aturan dan institusi dalam sistem internasional yang disesuaikan dengan pencapaian kepentingan ekonomi politiknya. Karena saling ketergantungan ekonomi tidak menjamin bahwa kerja sama akan menang atas konflik. Komunitas global yang memiliki nilai dan pandangan yang sama belum menggantikan anarki internasional. Masalah mendasar dari hubungan internasional di dunia kontemporer adalah masalah penyesuaian secara damai terhadap konsekuensi dari pertumbuhan kekuatan yang tidak merata di antara negara-negara, sama seperti di masa lalu. Masyarakat internasional tidak dapat dan tidak berdiri diam. Perang dan kekerasan tetap menjadi kemungkinan akan terjadi (Gilpin, 1987 : 230).

### **5.1 Mengajak Negara Lain Untuk Meninggalkan dolar**

Untuk menjalankan kebijakan de-dollarisasi, pertama-tama Tiongkok mengajak negara mitra dagangnya untuk mengurangi penggunaan dolar pada transaksi bilateral dan mengutamakan penggunaan mata uang nasional. *Pertama*, Tiongkok melobi Rusia yang merupakan negara pengekspor minyak terbesarnya. Melalui badan eksekutif Tiongkok pada konferensi *Russia Calling* di Moskow pada tahun 2019 Tiongkok mengajak Rusia untuk menggunakan yuan sebagai alat pembayaran dan investasi. Namun saat itu, Presiden Vladimir Putin menolak penawaran dari eksekutif Tiongkok tersebut. Menurut Putin, “yuan memiliki batasan karena konvertibilitas, dan Tiongkok menyatakan masih terlalu dini bagi mereka untuk menerapkan pasar penuh seperti halnya Rubel (mata uang Rusia)”. Kata Putin

kepada lebih dari 2.000 peserta konferensi pada 20 November 2019 (Mangkuto, 2019). Namun akibat dari sanksi yang diberikan Amerika Serikat kepada Rusia pada bulan Maret sampai Mei 2018 Rusia melakukan de-dollarisasi dengan melepaskan obligasi pemerintah Amerika Serikat sebesar US\$ 81 miliar (Rp 1.166,4 triliun) atau sekitar 84% dari total kepemilikan kala itu (Pransuamitra, 2020).

Rusia juga menerima tawaran Tiongkok untuk melakukan transaksi bilateral menggunakan mata uang nasional yuan dan rubel. Sejak memulai upaya de-dollarisasi Rusia, pangsa yuan Tiongkok dalam perdagangan bilateral Tiongkok-Rusia telah meningkat dari 3,1 persen pada tahun 2014 menjadi 17,5 persen pada 2020. Sementaraitu, yuan telah menyumbang 30,4 persen dari kepemilikan dana kekayaan nasional Rusia, dan 12,8 persen dari cadangan devisa Rusia. Dari tahun 2018 hingga 2020, perdagangan bilateral Tiongkok-Rusia telah melebihi angka US\$100 miliar selama tiga tahun berturut-turut.

*Kedua*, Saat Turki mengalami krisis keuangan dan sanksi akibat memburuknya hubungan antara sekutu NATO Turki dan Amerika Serikat. Tiongkok menawarkan dukungan moral kepada Turki, Tiongkok percaya bahwa Turki memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Kementerian Tiongkok juga merujuk pada laporan media bahwa ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) telah menandatangani perjanjian pembiayaan US\$3,8 miliar dengan Turki. Bank Sentral Turki juga mengumumkan penggunaan yuan Tiongkok untuk pertama kalinya dalam sejarah ekonomi Turki, penggunaan yuan dan lira dalam hubungan Turki-Tiongkok berdasarkan perjanjian SWAP yang mulai direlisasikan pada Kamis 18 Juni 2020. Perjanjian ini dilakukan Turki karena ingin mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan global.

Selain Rusia dan Turki ada juga beberapa negara yang bergabung dalam aliansi tersebut untuk mengurangi penggunaan dolar seperti Uni Eropa dan Iran yang mendapatkan sanksi perdagangan dari Amerika Serikat. Tiongkok dan Rusia juga mengumumkan agar beberapa negara melakukan perdagangan dengan mata uang masing-masing. Pada *Belt and Road Initiative* Tiongkok memnita negara-negara yang bekerjasama untuk bertransaksi tidak dengan dolar melainkan menggunakan yuan. Seruan untuk tidak menggunakan dolar Amerika Serikat terus digulirkan oleh Tiongkok dan Rusia, Bahkan pada pertemuan BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, BRICS mengajak Turki, Jamaika, Indonesia, Argentina dan Mesir untuk melawan hegemoni dolar Amerika Serikat.

## **5.2 Internasionalisasi Yuan**

Internasionalisasi mata uang menggambarkan bagaimana mata uang suatu negara diterima sebagai alat pertukaran lintas batas dalam transaksi antar negara maupun aktor lainnya, seperti organisasi dan perusahaan multinasional. Ketika mata uang tersebut diterima sebagai alat pertukaran antar negara, maka statusnya menjadi mata uang internasional (Jayakarya, 2014 :21). Untuk menjadikan mata uang sebagai mata uang internasional, mata uang harus memiliki fungsi-fungsi dasar seperti *settlement currency* (alat pembayaran dalam perdagangan), *vehicle currency for third-party trade or foreign exchange transactions* (mata uang yang digunakan oleh pihak ketiga dalam perdagangan dan trarisaksi valuta asing), *unit of account* (satuan hitung), *dan reserve currency* (mata uang cadangan devisa). Mata uang domestik dikatakan sebagai mata uang internasional ketika ia telah siap dan sering digunakan dalam transaksi di antara non-warga negara di luar yurisdiksi dari negara issuer (negara pemilik mata uang) (Ramadhani, 2011 :24-25).

Dalam upaya menjadikan yuan sebagai mata uang internasional, Tiongkok mulai dengan memasukkan yuan dalam keranjang *Special Drawing Rights* (SDR) dilembaga *Internasional Monetary Fund* (IMF) pada tahun 2013. *Special Drawing Rights* (SDR) atau 'Hak Penarikan Istimewa' merupakan aset cadangan internasional yang dibuat International Monetary Fund (IMF) tahun 1996 untuk melengkapi cadangan devisa resmi negara-negara anggota IMF. SDR ini dapat ditarik atau 'diuangkan' oleh anggota yang membutuhkan. Negara anggota IMF memperoleh alokasi SDR yang besarnya berbeda-beda, dengan pertimbangan – antara lain PDB, keterbukaan ekonomi, dan cadangan devisa riil yang dimiliki. Walaupun dihitung dan dipublikasikan secara harian dalam mata uang USD, nilai SDR didasarkan pada keranjang mata uang internasional (saat ini terdiri dari Dollar Amerika Serikat, Euro, Yen Jepang, dan Poundsterling British). Setiap 5 tahun, komposisi dan bobot keranjang mata uang SDR ditinjau ulang untuk memastikan apakah keranjang mata uang SDR tersebut masih mencerminkan kepentingan dalam perdagangan dan sistem keuangan dunia (Muafi, 2019: 247-248).

Namun saat itu yuan dianggap IMF belum memenuhi kriteria untuk menjadi bagian dari SDR. Setelah melakukan berbagai cara dengan melakukan evaluasi dan membenahan sistem ekonomi dan moneterinya yaitu mengeluarkan kebijakan mereformasi sistem keuangannya dengan cara meningkatkan sistem pembentukan nilai tukar asing, membuka pasar obligasi dan valas antar bank, serta meningkatkan transparansi data perbankan. Sehingga IMF menyetujui yuan masuk menjadi bagian dari SDR, dan dapat dipergunakan mulai 1 Oktober 2016.

Dengan masuknya yuan dalam keranjang SDR secara otomatis merubah komposisi bobot SDR, awalnya USD memiliki bobot 41,9% menjadi 41,73%, Euro 37,4% menjadi 30,93%, Yen 9,4% menjadi 8,33%, Pound Sterling 11,3% menjadi

8,09% dan Yuan mendapat bobot sebesar 10,92% (Muafi, 2019: 247). Dengan masuknya Yuan ke SDR, keberadaan mata uang Tiongkok ini tidak hanya beredar di Tiongkok saja, Tetapi akan menyebar ke seluruh negara yang menjadi anggota IMF. Karena dengan masuknya Yuan ke SDR secara otomatis Yuan sudah menjadi mata uang internasional dan dapat dijadikan sebagai aset cadangan devisa negara. Akan tetapi meskipun peredaran yuan akan semakin luas, hal tersebut harus tetap dikendalikan produksinya oleh pemerintah dalam hal ini adalah Bank Sentral agar terhindar dari inflasi yang akan mengakibatkan harga barang menjadi lebih mahal. Memasukkan yuan ke SDR merupakan langkah Tiongkok untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka panjang. Dimana Tiongkok berkaca dari negara-negara sebelumnya yang sudah dulu masuk SDR seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris dan Jepang.

Internasionalisasi didukung oleh masyarakat Tiongkok yang meyebar diberbagai belahan dunia. Saat orang Tiongkok menyebar keseluruh dunia, penerimaan yuan semakin mudah dilakukan. Seperti pedagang di Hongkong, Singapura dan beberapa negara Asia lainnya yang sekarang merima uang tunai yuan, yang terpenting transaksi berbasis yuan digital semakin mudah untuk diterima karena bebas dari control dan tidak stabil. Selain itu, suku bunga yuan yang lebih rendah banyak perusahaan memilih menggunakan yuan karena dianggap lebih menguntungkan dari pada dolar Amerika Serikat yang suku bunganya lebih tinggi. Perusahaan asing juga dapat melakukan transfer langsung antar anak perusahaan dengan yuan tanpa mengonversi kemata uang dolar terlebih dahulu, begitu juga sebaliknya. Dan sudah 130 anak perusahaan Samsung di Tiongkok melakukan cara ini. Karena Tiongkok juga akan memberikan hadiah bagi perusahaaan swasta yang

memfasilitasi penyediaan transaksi dalam yuan. Tiongkok juga mulai mengizinkan beberapa warganya untuk berinvestasi diluar negeri (Overholt, 2016 : 11).

Internasionalisasi yuan terus dilakukan Tiongkok pada perdagangan global. Hingga penggunaan yuan pada perdagangan dunia meningkat dengan sangat cepat, dalam 21 bulan hingga Oktober 2013 dari 1,9% menjadi 8,7% melampaui euro Uni Eropa. Sekitar 18% atau sekitar US\$ 272 miliar dari perdagangan Tiongkok yang dilakukan dengan menggunakan yuan pada tahun 2013 (Overholt, 2016 :11). Sebagian besar pasar perdagangan dengan yuan masih terjadi di Hongkong, tetapi kota-kota besar lainnya seperti London, Paris, Frankfurt, Toronto, Seoul, Taipei, Singapura dan Sydney telah bersaing untuk menciptakan pusat pemukiman dan bisnis menggunakan yuan. Tiongkok juga memperluas upaya untuk menginternasionalisasikan mata uang yuan pada komoditas pasar terbesar dunia yaitu, *International Energy Exchange* (INE) yang beberapa dekade didominasi oleh dollar Amerika Serikat.

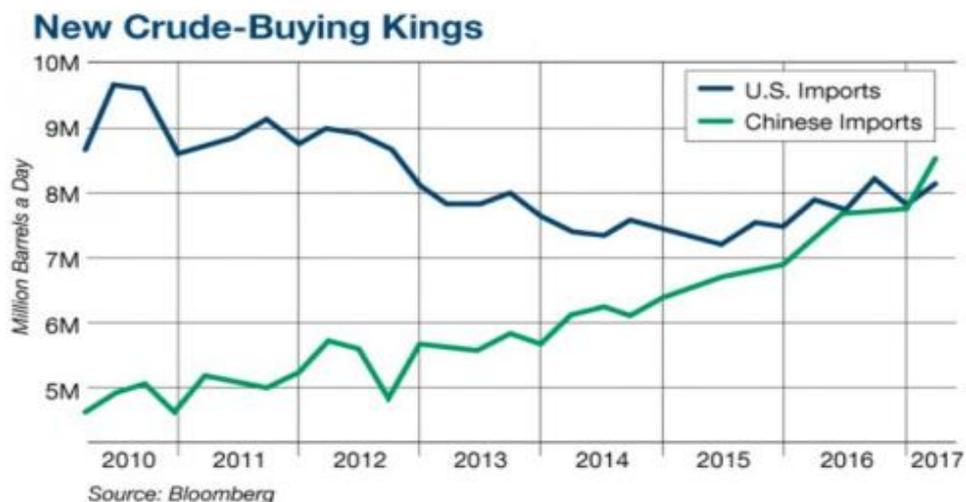
### **5.2.1 Shanghai Futures Exchange (ShFE)**

ShFE merupakan bursa berjangka Tiongkok yang berada dibawah *China Securities Regulatory Commission* (CSRC) dan mengatur perdagangan berjangka yang disetujui oleh CSRC sesuai dengan prinsip keterbukaan, ketidakberpihakan, keadilan dan integritas. Saat ini terdapat 20 kontrak berjangka dan 5 pilihan komoditas yang tersedia di ShFE, antara lain kontrak berjangka pada tembaga, aluminium, seng, timbal, nikel, timah, emas, perak, baja tulangan, batang kawat baja, kumparan canai panas, bahan bakar minyak, minyak mentah, bitumen, karet alam, pulp, baja tahan karat, tembaga berikat. *Shanghai Futures and Derivatives Research Institute* dan *Shanghai International Energy Exchange* adalah anak perusahaan ShFE (ShFE.com). Tiongkok meluncurkan minyak berjangka

berdominasi yuan dalam ShFE ketika Tiongkok menjadi importer minyak terbesar dunia dan telah melampaui importer utama dunia Amerika Serikat.

### Grafik 5.1: Impor Minyak Amerika Serikat vs Tiongkok (juta barel perhari)

2010-2017



Sumber : Jurnal John A. Mathews and Mark Selden dengan judul Tiongkok: The Emergence of the Petroyuan and the Challenge to US Dollar Hegemony

Pada gambar menunjukkan bagaimana peningkatan impor minyak Tiongkok dari tahun 2010-2017 mengalami peningkatan yang signifikan mengalahkan Amerika Serikat, dan pemasok utama dan terbesar minyak Tiongkok adalah Rusia, Namun, transaksi yang dilakukan masih menggunakan dolar Amerika. Untuk itu, Tiongkok perlu melobi negara mitranya untuk melakukan de-dollarisasi dan lebih mengutamakan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan bilateral. Awalnya, Rusia menolak penawaran Tiongkok karena presiden Vladimir Putin menganggap yuan memiliki batasan karena konvertibilitas. Namun pada bulan maret hingga Mei 2018 Rusia melakukan de-dollarisasi dengan melepaskan obligasi pemerintah Amerika Serikat sebesar US\$81 miliar atau 84% dari total kepemilikan kala itu (Mangkuto, 2019). Hal ini dilakukan Rusia sebagai balasan atas sanksi yang diberikan Amerika Serikat kepada perusahaan Aluminium asal Rusia, Rusal. Rusal

terkait dengan taipan Oleg Deripaska yang juga dekat dengan Presiden Vladimir Putin, karena dianggap ikut campur pada pemilu Amerika Serikat tahun 2016 (Pransuamitra, 2020)

Selain melepas obligasi pemerintahan Amerika Serikat, Rusia akhirnya menerima tawaran Tiongkok untuk berkerjasama dalam kontrak minyak berjangka menggunakan mata uang nasional kedua negara tersebut. Setelah terjadi negosiasi antara kedua negara, *Shanghai Futures Exchange* (ShFE) di Shanghai yang berdominasi yuan diluncurkan pada tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat sejajar dengan acuan harga minyak internasional lainnya, seperti Brent di London dan West Texas Intermediate (WTI) di New York. Untuk harga diperdagangkan dilever US\$68,48 atau setara 432,2 yuan per barel pada pukul 09:45 waktu setempat, harga dibuka di level US\$69,70 atau setara 440,20 yuan per barel. Sementara itu kontrak dari dua pemasok utama minyak berdominasi dolar, yaitu Brent berkisar US\$68,72 per baler dan WTI US\$64,37 per barel (Rianti, 2018) .

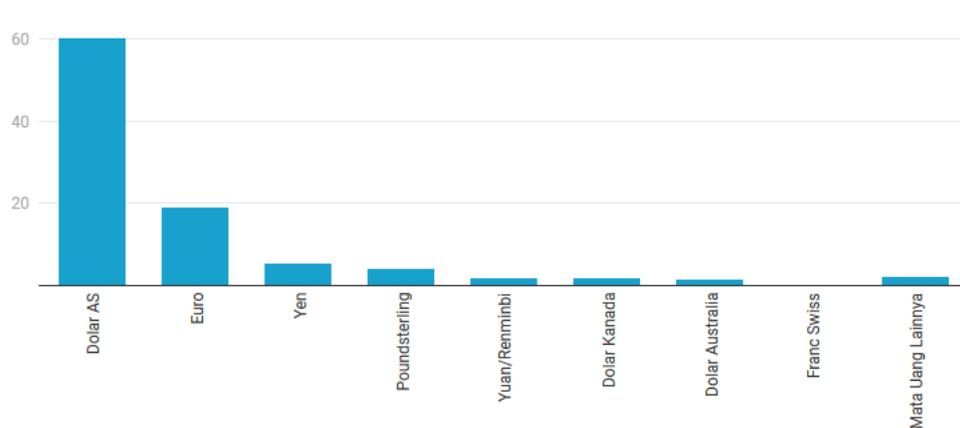
Perdagangan minyak berjangka Rusia-Tiongkok mulai aktif dilakukan pada Oktober 2017. Pada hari pertama perdagangan di Shanghai mencapai 62,500 kontrak dengan lebih dari 62 juta barel minyak mentah diperdagangkan dengan nilai nasional hampir 27 miliar yuan atau US\$ 4 miliar (Fitriani, 2018). Dan belum sampai satu tahun volume transaksi ShFE telah menyelip kontrak berjangka minyak dalam dolar Amerika Serikat di Singapura dan Dubai namun masih tertinggal jauh dari Brent dan WTI. Namun ShFE telah disambut antusias oleh pedagang komoditas multinasional, seperti Glencore, Trafigu, Freepoint commodities. Begitu juga dengan Rusia, Menurut laporan Bank of Russia, negara tersebut meningkatkan bagian yuan dalam cadangannya, dari lebih dari 2% pada tahun 2018 menjadi lebih dari 14% pada tahun 2019. Pada saat yang sama Rusia telah mengurangi bagian dolar

Amerika Serikat dari 30% menjadi 9,7%. Ini berarti bahwa perdagangan Tiongkok-Rusia menggunakan dolar telah turun lebih dari 50% (Sebayang, 2020).

Mengikuti langkah Tiongkok dan Rusia, Uni Eropa juga bernegosiasi mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan minyak berjangka dan menggunakan mata uang Euro untuk transaksi bilateral. Sedangkan Iran, Irak dan Indonesia juga bergabung menggunakan mata uang nasional ketika berdagang dengan Tiongkok dan Rusia. Dan Turki merupakan negara yang sudah menggunakan yuan untuk transaksi perdagangan dengan Tiongkok.

Penggunaan yuan telah didorong oleh perdagangan berbasis minyak berjangka di Shanghai. Namun, penggunaan yuan dalam perdagangan global masih terbatas dibawah 2% yaitu berkisar 1,66%, sementara dollar Amerika Serikat tetap mendominasi cadangan dunia dengan kisaran 60,8% dari cadangan yang dialokasikan pada tahun 2019. Yuan hanya berada di urutan ke-5 mata uang cadangan devisa (Grafik 2). Meski penggunaan yuan masih rendah pengaturan swap akan memberikan beberapa stabilisasi fungsi yang biasanya terkait dengan cadangan SDR yang lebih signifikan (Ini adalah di luar perdagangan dan peran komersial lainnya yang didukung oleh swap). Seperti yang dilakukan Amerika Serikat pada mata uang dolar. PBoC telah menandatangani 28 swap aktif senilai lebih dari 3 triliun yuan (US\$ 498,5 miliar). Sebagai perbandingan, karena pembatasan legislatif, Fed Amerika Serikat hanya memiliki lima pertukaran likuiditas tetap – dengan Kanada, Zona Euro, Jepang, Swiss, dan Inggris – senilai US\$ 333 milyar.

### **Grafik 5.2: Komposisi Cadangan Devisa Dunia**



Sumber :

CNBC Indonesia

Pertukaran skala besar seperti itu penting bagi Tiongkok karena tiga alasan. Pertama, mereka semakin dilihat sebagai alat manajemen krisis yang vital. Kedua, kepercayaan global pada Federasi Amerika Serikat sebagian besar berasal dari kemauan dan kemampuan untuk menawarkan swap dalam krisis. Namun, setelahnya krisis Meksiko 1994, Kongres Amerika Serikat membatasi federasi dan kekuatan Departemen Keuangan untuk bertindak. Dengan demikian, Amerika Serikat gagal menawarkan pertukaran ke Thailand atau Indonesia pada tahun 1997-1998 atau ke Tiongkok pada tahun 2008. Ketiga, kearifan Keputusan Beijing untuk menawarkan begitu banyak pertukaran belum diuji oleh mayor krisis keuangan (Overholt, 2016).

### 5.2.2 Belt and Road Initiative (BRI)

*Belt Road and Initiative* (BRI) adalah sebuah proyek yang diluncurkan oleh pemerintah Tiongkok untuk negara-negara berkembang serta guna meningkatkan konektivitas global. Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2013 oleh presiden Tiongkok Xi Jinping, BRI terus tumbuh dan berkembang dalam skala dan popularitas yang baik. BRI terdiri dari jalur sutera maritime abad ke-21 dan jalur ekonomi jalur sutera yang akan menghubungkan lebih dari 65 negara yang telah meningkatkan 35% arus perdagangan dunia dan lebih dari 31% PDB dunia.

Proyek ini mengembangkan berbagai infrastruktur seperti jalan raya, kereta api dan pelabuhan serta fasilitas pembangkit energi, telekomunikasi, instalasi kesehatan dan pendidikan. BRI mencakup 6 jalur koridor internasional yang di dalamnya meliputi: (1) Jembatan Tanah Eurasia Baru, (2) Koridor ekonomi Tiongkok-Mongolia-Russia, Tiongkok-Central Asia- West Asia Economic Corridor, (4) TiongkokIndoTiongkok Peninsular Economic Corridor , (5) Tiongkok-Pakistan Economic Corridor , dan (6) Bangladesh-Tiongkok-India-Myanmar Economic Corridor (Brown, 2017).

Meski BRI dianggap sebagai jebakan hutang Tiongkok pada negara miskin dengan tujuan memperoleh aset strategis (sumber daya alam) atau pengaruh politik negara pengutang seperti yang terjadi di Zimbabwe<sup>2</sup>. Namun, keanggotaan BRI semakin bertambah. Dalam BRI forum yang ke/1 Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan sudah 150 negara menandatangani keikutsertaan mereka dalam BRI. Sejak diluncurkan hingga pertengahan semester 2019 jumlah pinjaman luar negeri untuk proyek ini telah lebih dari US\$ 90 miliar (Hasugian, 2019). Tidak heran jika BRI dijadikan alternatif Tiongkok untuk memperluas penggunaan yuan pada perdagangan internasional.

Menurut BRI news Tiongkok telah meningkatkan penggunaan yuan untuk transaksi bilateral dengan banyak negara di ASIA, mulai dari kamboja. Distributor computer kamboja, Yako Technology, telah melakukan transaksi valuta asing langsung pertama antara riel dan yuan melalui *Bank of China* Hong Kong di Phnom Penh pada bulan juli 2020. Uang itu ditransfer keakun eksportir Yako di Tiongkok, dimana penyelesaiannya dilakukan melalui Bank of Tiongkok Hong Kong di Guangxi, wilayah otonomi di Tiongkok Selatan. Guangxi, yang berbatasan dengan Vietnam adalah gerbang Tiongkok untuk kerjasama dengan negara-negara ASEAN,

yang merupakan bagian penting dari BRI. Lintas batas yang dilakukan di kawasan itu melebihi 1 triliun yuan (US\$ 142 miliar) pada Agustus 2019. (Sebayang, 2020).

Sedangkan Bank Indonesia (BI) dan sentral Tiongkok, *People's Bank Of China* (PBoC) menyepakati pembayaran transaksi perdagangan bilateral dan investasi langsung menggunakan mata uang lokal kedua negara, yakni yuan dan rupiah pada tanggal 30 September 2020. Kesepakatan itu dilangsungkan oleh Gubernur PBoC Yi Gang dan Gubernur BI Perry Warjiyo melalui penandatanganan nota kesepahaman. Bi menyakini kerjasama ini akan diperkuat melalui pertukaran informasi dan diskusi secara berkala antara otoritas Tiongkok dan Indonesia. Kesepakatan ini juga akan memperkuat kerjasama keuangan bilateral antara kedua negara. Sebelum menjalin kerjasama dengan Bank sentral Tiongkok, BI telah mengandeng Bank of Thailand (BoT), Bank Negara Malaysia (BNM), Kementerian keuangan Jepang, Bank of Korea, Reserve Bank of Australia, dan Singapura terkait dengan penggunaan uang lokal dalam hubungan perdagangan dan investasi guna meminimalisir ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (CNN indonesia, 2020).

Seorang ekonom dan ahli strategi di DBS Bank, Nathan Chow mengatakan focus perdagangan Tiongkok ke ASEAN untuk internasionalisasi yuan karena perdagangan bilateral di ASEAN lebih besar volumenya dibanding perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Perdagangan Tiongkok- ASEAN naik 1% year-or-year menjadi US\$ 1,6 triliun dalam lima bulan pertama 2020 dan menyumbang 14,7% volume perdangan Tiongkok. Sedangkan volume perdagangan Tiongkok - Ameriak Serikat menyumbang 11% dan Uni Eropa 13,9% (Lestari, 2010).

Meningkatkan penggunaan yuan dalam transaksi lintas batas dinegara-negara BRI dapat dipandang sebagai bagian dari tujuan jangka panjang Tiongkok

untuk menjadikan yuan sebagai mata uang utama dalam perdagangan dunia. Banyaknya investasi asing yang masuk ke pasar Tiongkok dapat meningkatkan peluasan mata uang yuan karena perusahaan asing yang masuk ke Tiongkok akan memiliki rekening Bank dalam mata uang yuan. Uang itu tidak hanya akan digunakan sebagai alat bayar barang dan jasa produk Tiongkok, tetapi juga dapat digunakan untuk membeli obligasi dan saham pemerintahan. Maka dampaknya akan sangat signifikan dalam memperkuat pasar modal Tiongkok dan mempercepat internasionalisasi yuan.

Untuk lebih mendukung internasionalisasi yuan, Tiongkok telah membangun dan memperkuat dengan jaringan keuangan diseluruh dunia. Tiongkok telah melakukan Swap yang luas dengan bank sentral lainnya yang membantu mendukung perdagangan dan menawarkan beberapa stabilitas biasanya terkait dengan cadangan devisa jika terjadi krisis. Saat ini *China Development Bank* (CDB) dan *Silk Road Fund* yang akan menyediakan lebih banyak dana yuan untuk proyek-proyek besar dari waktu ke waktu. Dan yang terpenting adalah , orang Tiongkok yang semakin suka berpergian membawa yuan ke setiap sudut dunia dan juga mereka adalah pembelanja terbesar di dunia. Yang terpenting adalah skema *Stock Connect* akan menciptakan substansial arus lintas batas yuan yang dapat berkembang pesat. Tumbuh pesat pasar yuan di luar negeri berarti mata uang akan mudah diperdagangkan sepanjang waktu, ini akan dapat menguntungkan bank dengan kapasitas global dan keahlian Tiongkok (Overholt, 2016).

### **5.3 Mengurangi Kepemilikan Obligasi Pemerintahan Amerika Serikat**

Surat utang (Obligasi) merupakan salah satu efek yang tercatat di Bursa disamping efek lainnya, seperti saham, Sukuk, Efek Beragun Aset maupun dana investasi Real Estat. Obligasi dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat hutang

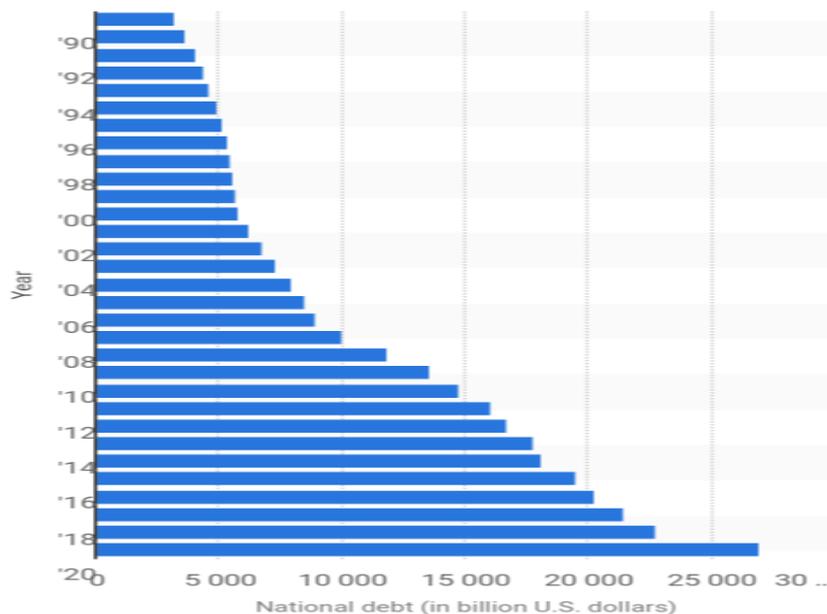
disamping sukuk. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi (perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD) maupun negara (BEI, 2021).

Obligasi biasanya diterbitkan untuk suatu jangka waktu tetap diatas 10 tahun. Surat utang yang erjangka 1 sampai 10 ahun disebut “Surat Uttang”, dan utang dibawah 1 tahun disebut “surat perbendaharaan”. Di Indonesia surat utang berjangka 1 sampai 10 tahun yang diterbitkan pemerintah disebut “surat utang negara” (SUN) dan utang dibawah 1 tahun yang diterbitkan pemerintah disebut “surat penbendaharaan negara” (SPN). Obligasi dapat bermanfaat bagi penerbit obligasi, maupun pemegang obligasi. Bagi penerbit obligasi, akan mendapatkan dana segar dengan cepat. Sedangkan negara pemegang obligasi mendapatkan bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Bunga yang ditawarkan obligasi umumnya akan lebih tinggi dari bunga deposito atau SBI. Selain itu pemegang obligasi juga dapat menjual obligasi yang dimilikinya dengan harga yang lebih besar (*kapital gain*) (BEI, 2021).

Dampak Great Depression tahun 1929 membuat Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi akibat dari pelepasan saham secara masif. Sebanyak 13 juta lembar saham berpindah tangan dalam waktu sehari. Jatuhnya pasar saham menyebabkan penurunan daya beli, menyusutnya investasi, guncangan sektor industry, dan merebaknya pengangguran. Merebaknya pengangguran menyebabkan kredit macet meningkat, dan penyitaan asset melonjak. Karena dana simpanan tunai Amerika Serikat rendah saat itu, dan Amerika Serikat memerlukan pinjaman dari luar untuk

membayai defisit anggaran federal dan kebutuhan modal. Hingga Amerika Serikat menerbitkan obligasi guna memperbaiki perekonomiannya.

**Grafik 5.3: Utang publik Amerika Serikat tahun 1990 – September 2020  
(dalam miliar USA)**



Sumber : Statista.com

Grafik diatas menunjukkan kenaikan utang publik Amerika Serikat dari tahun 1990 sampai September 2020. Tiongkok merupakan pemegang terbesar obligasi Amerika Serikat, hingga januari 2018 kepemilikan Tiongkok atas obligasi Amerika Serikat sebesar US\$1,17 triliun dan menjadikannya sebagai kreditur asing terbesar Amerika Serikat setelah Bank Sentral Amerika Serikat, *Federal Reserve* (Sebayang, 2018). Namun akibat perang dagang yang dilontarkan presiden Amerika Serikat Donald Trump, Tiongkok berangsur mengurangi porsi kepemilikan obligasi Amerika Serikat. dan beralih pada cadangan modal di aset riil.

Sebelumnya pada tahun 2015, Tiongkok sudah pernah menjualkan obligasi Amerika Serikat akibat Resesi ekonomi yang dialami Tiongkok, yakni sekitar US\$ 106

miliar atau setara RP 1.500 triliun. Dan pada tahun 2018 Tiongkok kembali mengurangi kepemilikan atas obligasi Amerika Serikat sebesar US\$ 88 miliar atau RP 1.238 triliun sejak tahun 2018. Penurunan tersebut terlihat pada kepemilikan Tiongkok atas obligasi Amerika Serikat dari US\$ 1,17 triliun pada tahun 2018 menjadi US\$ 1,12 triliun di bulan Maret 2019, dan US\$ 1,07 triliun pada bulan April 2020 (Mangkuto, 2019). Penurunan ini membuat Tiongkok digantikan oleh Jepang yang menempati posisi pertama sebagai kreditur terbesar pertama dan Tiongkok diposisi kedua.

Namun demikian, saat Tiongkok mengurangi kepemilikannya atas obligasi pemerintahan Amerika Serikat, Tiongkok telah melakukan pembelian secara besar-besaran obligasi pemerintahan Jepang. Menurut data dari kementerian Keuangan Jepang, Tiongkok mengambil membeli obligasi Jepang senilai 27,7 miliar yen atau US\$17 miliar pada bulan September 2020. Nilai pembeliannya mencapai 14 triliun yen, naik 73 persen dari tahun 2019 (Rafie, 2020).

Pengurangan Tiongkok atas Obligasi Amerika Serikat masih dianggap sedikit dibandingkan dengan Rusia. Secara teori sebagai kreditur terbesar Pemerintahan Amerika Serikat, Jika Tiongkok melepas setengah dari 1,1 triliun obligasi Amerika Serikat, harga akan jatuh, mengirim imbal hasil (atau suku bunga) melonjak dan menyebabkan biaya pinjaman Amerika Serikat melonjak. Tetapi ada alasan lain mengapa Tiongkok tidak melepaskan obligasi Amerika Serikat dalam jumlah yang besar adalah tidak memiliki efek besar pada perekonomian Tiongkok.

#### **Grafik 5.4: Kepemilikan Obligasi Amerika Serikat (US\$ miliar)**



Sumber : CNBC Indonesia

Selain itu Tiongkok masih mempertimbangkan dampak yang diterima bukan saja dari sisi ekonomi Amerika Serikat tetapi juga akan berdampak pada ekonomi global. Jika Tiongkok melepas obligasi Amerika Serikat dalam jumlah yang besar, Maka akan memukul sektor keuangan Amerika Serikat dan investor global karena obligasi Amerika Serikat merupakan tolak ukur keuangan global. Jika Tiongkok melepas obligasi Amerika Serikat secara signifikan, maka kurs dolar akan anjlok, harga obligasi akan merosot dan yield-nya meresat naik, suku bunga juga akan ikut naik, dan tentunya akan berbalik pada perekonomian Tiongkok. Tiongkok juga sangat berkepentingan menjaga agar nilai tukar mata uangnya terutama agar tidak menguat maka barang-barang yang dijual negaranya akan lebih tidak laju.

#### **5.4 Mendiversifikasi Cadangan Devisa**

Cadangan devisa adalah aset yang disimpan oleh bank sentral dalam mata uang asing. Cadangan devisa adalah total valuta asing yang dimiliki pemerintah dan swasta dari suatu negara. Cadangan devisa dapat diketahui dari posisi neraca pembayaran. Semakin banyak devisa yang dimiliki pemerintah dan penduduk suatu negara semakin besar kemampuan negara tersebut dalam melakukan kegiatan

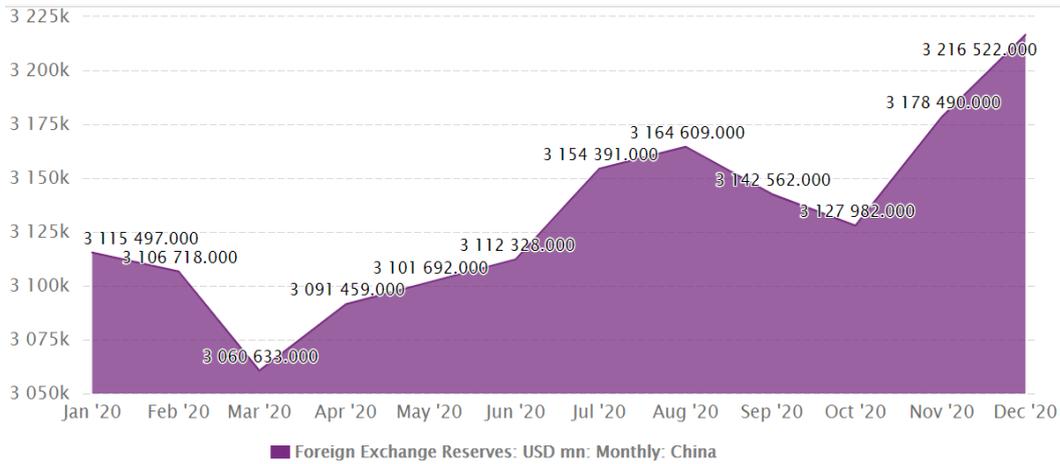
transaksi ekonomi dan keuangan internasional dan semakin kuat pula mata uang negara.

Cadangan devisa bisa berupa uang kertas, deposito, obligasi, dan sekuritas pemerintah lainnya. Cadangan devisa dapat dipergunakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan untuk membiayai defisit pada neraca pembayaran (Rezieq, 2006). Hal yang umum adalah bahwa negara-negara dunia memiliki cadangan devisa dan sebagian besarnya dalam mata uang dolar. Bahkan negara yang memiliki status mata uang internasional yang masuk dalam SDR seperti Euro dan yen Jepang. Ini karena dolar merupakan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia dan dianggap paling stabil nilainya dari mata uang lain.

Sebagai negara yang terlibat dalam perdagangan Tiongkok merupakan negara dengan cadangan devisa terbesar di dunia dengan total US\$ 3.216,5 pada bulan Desember 2020 dengan porsi terbesar dalam mata uang dolar. Untuk melanjutkan aksi de-dollarisasi, Tiongkok mulai mengurangi porsi dolar dalam cadangan devisannya dan mendiversifikasi ke dalam mata uang lain. Seperti Poundsterling, yen, dan Euro untuk menjaga kestabilan nilai tukar jika dolar mengalami penurunan.

Selain itu Tiongkok juga meningkatkan pembelian emas. Ini dilakukan Tiongkok karena emas merupakan tempat yang aman untuk investasi. Bank sentral Tiongkok atau *The People's Bank of China* telah meningkatkan cadangan emas pada bulan April sebesar 61,10 juta ons dan pada bulan Mei cadangan emas Tiongkok menjadi 61,61 juta ons tahun 2019. Hingga Desember tahun 2020 cadangan emas Tiongkok menjadi US\$ 118.246 juta. Cadangan devisa Tiongkok mengalami peningkatan meski beberapa waktu terlibat dalam perang dagang dengan Amerika Serikat serta epidemi Covid-19 (Kontan.co.id, 2020).

**Grifik 5.5 : Cadangan Devisa Tiongkok tahun 2020 (dalam US\$)**



Sumber :

[www.ceicdata.com](http://www.ceicdata.com)

Tidak hanya Tiongkok, negara-negara dunia juga mulai mendiservikasi cadangan emas dan valuta asing mereka dengan alasan untuk melindungi diri dari keuangan Amerika Serikat. Menurut *World Gold Council* (WGC), peningkatan pangsa emas dalam struktur cadangan devisa negara jelas dimanifestasikan di Rusia dan Tiongkok.

**Tabel 5.1: Struktur Emas Dalam Cadangan Resmi Negara di dunia**

Gold in the structure of official reserves				
Country	Volume of gold official reserves, 1		Volume of gold in official reserves, %	
	01.01.2016	01.01.2019	01.01.2016	01.01.2019
USA	8133.5	8133.5	72.6	75.2
Germany	371.0	3391.0	66.8	70.6
Italy	2451.8	2451.8	67.9	67.9
France	2436.0	2436.0	63.9	63.9
Russia	1414.6	2113.0	12.8	18.4
Tiongkok	1762.3	1887.2	2.2	2.4
Swiss	1040.0	1040.0	5.4	5.4
Japan	765.2	765.2	2.5	2.5
Nederland	612.5	612.5	65.8	65.2
India	556.8	598.7	5.5	6.2

Sumber : Jurnal Platonova, 2019

Menurut Bloomberg dalam beberapa tahun terakhir, pembeli terbesar emas di *London Metal Exchange* (LME) adalah Tiongkok dan India, peningkatan pangsa emas ditunjukkan dalam cadangan resmi India yang mengalami peningkatan. Pada gilirannya, Bank Rusia membeli dari perusahaan pertambangan Rusia untuk rubel, bukan dolar, hampir seluruh volume emas yang diproduksi (250-280 ton per tahun) meningkatkan cadangan emas ke 2113.0 ton pada awal 2019. Menurut *World Gold Council* (WGC) Bank Sentral Rusia pada tahun 2018 Rusia telah meningkatkan pembelian emas berkisaran 274,3 ton. Tiongkok perlahan-lahan mengurangi bagian dari dana yang diinvestasikan dalam obligasi jangka panjang dan kewajiban hutang pemerintah Amerika Serikat. Sejak tahun 2018, kepemilikan Rusia atas obligasi Amerika Serikat menurun dari US\$96 miliar. hingga US\$ 15 miliar diawal 2019. Dan pada Agustus 2019, kepemilikan Rusia atas obligasi Amerika Serikat menurun menjadi US\$9 miliar (Platonova, 2019 : 74).

Dalam beberapa tahun terakhir Tiongkok juga membangun cadangan banyangan melalui investasi alternatif. Investasi tersebut termasuk ekuitas serta menerbitkan pinjaman melalui bank-bank milik negara, terutama untuk BRI yang sangat besar. *State Administration of Foreign Exchange* (SAFE) yang mengelola cadangan devisa Tiongkok, memiliki empat entitas investasi: Huaxin di Singapura, Huaou di London, Huamei di New York, dan Hua di Hongkong. Dana yang telah diinvestasi Tiongkok termasuk Dana pembangunan Tiongkok-LAC (*Line Of Actual Control*) yang membiayai proyek-proyek di Amerika Latin dan kawasan Karibia dengan total US\$1,86 triliun pada Juni 2019 (Egindo.co, 2019).

Mengutip Reuters, Wang Chunying juru bicara SAFE menyebutkan dalam situs mereka bahwa Tiongkok akan memperkuat alokasi valuta asing jangka menengah panjang, Namun tidak menyebutkan komposisi karena dianggap rahasia negara.

Mendiversifikasi cadangan devisa akan membantu Tiongkok menurunkan risiko. Cadangan devisa dapat dipergunakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan untuk membiayai defisit pada neraca pembayaran saat Amerika Serikat melakukan pembatasan pada investasinya di Tiongkok dengan melakukan delisting saham Tiongkok di Amerika Serikat. Tiongkok juga akan melonggarkan aturan persetujuan pertukaran mata uang untuk pasar komoditas berjangka (Reuters, 2019).

### **5.5 Beralih Kemata Uang Digital**

Langkah selanjutnya yang dilakukan Tiongkok untuk menghindari ketergantungan pada dolar Amerika Serikat adalah dengan mengembangkan mata uang digital sendiri, yang disebut dengan yuan digital. Yuan digital merupakan digitalisasi dari uang kertas dan koin yang beredar saat ini. Masyarakat Tiongkok dapat menggunakannya sebagai alat pembayaran non tunai dan tidak akan ada bunga saat melakukan transaksi, seperti transaksi pembayaran tagihan, dan transportasi hingga layanan pemerintahan dengan menggunakan Aplikasi dari Smartphone/Android. Dalam aplikasi tersebut terlihat yuan digital bekerja melalui Bank PBoC mendistribusikan uang ke Bank komersial, lalu Bank komersial akan bertanggung jawab menyerahkannya pada masyarakat, termasuk layanan penukaran uang tunai dan koin dengan yuan digital (Bestari Putri, 2021).

Yuan digital mirip seperti *cryptocurrency* dengan mengabungkan beberapa teknologi *blockchain*, Sebab transaksi akan dicatat dan dapat dilacak dalam buku digital. Sehingga pemerintah Tiongkok bisa mengetahui bagaimana, kapan, dan dimana orang-orang memberlanjkan uang mereka. Meski disebut mirip dengan Bitcoin yang menggunakan sistem *blockchain*, namun adasekit berebeda. Bitcoin bersifat desentralisasi, semua transaksi diverifikasi oleh semua mesin yang terlibat didalam ekosistem ini. Kepemilikan Bitcoin tidak dimiliki dan dikendarikan oleh satu

entitas, dan tidak didistribusikan oleh Bank sentral. Sementara Yuan digital kepemilikannya yang diatur resmi oleh pemerintah Tiongkok, melalui Bank sentral Tiongkok. Sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola pasokan moneter negara (CNN indonesia, 2020).

People Bank of China (PBoC) ditunjuk menjadi ujung tombak proyek dan disebut sebagai *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Meski CBDC belum dirilis secara resmi oleh *The People's Bank of China* Namun CBDC mulai menyusun undang-undang yang menyediakan kerangka kerja peraturan dan legitimasi untuk mata uang digital. Undang-undang tersebut terbuka untuk konsultasi publik hingga 23 November 2020. Tiongkok memang terus memperluas wilayah uji coba yuan digital, pada 2019 mata uang yuan digital diuji coba di Shenzhen dan Xiongan. Untuk menguji yuan digital, pemerintah membagikan uang fiat elektronik setara US\$ 1,5 juta di Shenzhen. Metode pembayarannya beragam, mulai dari kode bar (*barcode*), pengenalan wajah (*Face detection*) dan *tap and go*. Wakil gubernur PBoT Fan Yifei menyebutkan yuan digital telah digunakan 3,13 juta kali transaksi pada tahun 2019. Kini Tiongkok menguji coba yuan digital di Shanghai. Perluasan ini bertepatan dengan upaya Tiongkok menekan perilaku antimonopoli disektor teknologi, termasuk Alibaba dan Tencent (Burhan, 2021).

PBoT menganggap yuan digital sebagai infrastruktur keuangan penting untuk masa depan. Yuan digital merupakan pengembangan *Digital Currency Electronic Payment* (DCEP) yang akan mendorong ekonomi terbesar kedua di dunia bebas dari uang tunai, PBoT mengatakan mata uang digital yang tengah mereka kembangkan bakal berdampingan dengan platform teknologi finansial seperti Alipay milik Ant group dan WeChat pay milik *Tencent Holding*. Saat ini, kedua platform

digital tersebut tengah mendominasi pasar jasa pembayaran digital di Tiongkok (Fauzia, 2021).

Dilansir dari Bloomberg, salah satu alasan utama BPoT mengembangkan yuan digital adalah untuk menyediakan pilihan layanan cadangan selain Alipay dan WeChat pay, pasalnya, menurut Director PBoT bidang *Digital Currency Institute*, Mu. Bila dominasi pasar keduanya mencapai 98 persen dari seluruh pasar layanan pembayaran digital mengalami hal yang buruk baik secara keuangan maupun teknis, hal itu dapat memberi dampak negative terhadap stabilitas keuangan Tiongkok. Berdasarkan estimasi Bloomberg Intelligenci, yuan digital secara perlahan dalam mengurangi dominasi pasar dari Alipay dan WeChat pay. Setidaknya yuan digital dapat mengambil alih sekitar 9 persen dari keseluruhan pasar layanan pembayaran digital tahun 2025. Selain itu yuan digital juga meningkatkan efisiensi dari sistem pembayaran sekaligus meningkatkan inklusi keuangan (Fauzia, 2021).

Presiden Asosiasi Keuangan Tiongkok, Xiaochuan mencatat mata uang digital Tiongkok akan mendukung sistem ritel domestik negara itu dan melindungi ekonomi dari dolarisasi. Saat berbicara di konferensi Forum Eurasia pada 27 Oktober 2020, mantan gubernur tersebut mengatakan bahwa mereka sedang membangun mata uang digital yang berbeda dari G7<sup>3</sup>. Dia menambahkan bahwa G7 hanya mementingkan tantangan yang ditimbulkan oleh koin seperti Libra atau Bitcoin. Di sisi lain, *People's Bank of China* sedang menciptakan sistem pembayaran digital bagi ritel untuk bertransaksi di dalam negeri dan mencegah dominasi dolar Amerika Serikat di pasar ritelnya. Xiaochuan menekankan prinsip mereka untuk CBDC sangat berbeda dari konsep G7. Oleh karena itu, mereka akan terus mendorong dan bekerja untuk menyukseskan CBDC (www.Collegian, 2020).

---

Saat ini negara-negara Asia Tengah sedang berlomba-lomba membuat sistem keuangan digital, mengingat kebutuhan uang digital yang semakin berkembang akibat pandemic COVID-19. Saat pandemic, orang-orang lebih memanfaatkan uang digital ketimbang memegang uang tunai. Hal ini tak jauh berbeda dari fenomena yang ada di Tiongkok saat perayaan Imlek lalu. Tercatat sekitar 50.000 warga Tiongkok mulai memberikan angpao uang digital yang bisa digunakan untuk berbelanja secara online maupun offline. Percepatan yuan digital sedikit banyak mempengaruhi ekonomi diseluruh dunia lantaran Presiden Xi Jinping punya ambisi untuk menginternasionalisasikan mata uangnya. Negara Tirai Bambu itu sudah melakukan serangkaian tes. Tes serupa telah diadakan di Suzhou. Sejauh ini BPOC telah mendistribusikan lebih dari 100 juta yuan digital. Distribusi dan berbagai program yang menstimulasi yuan digital akan digulirkan selama Olimpiade Musim Dingin Beijing pada 2022 mendatang (Ulya, 2021).

## **KESIMPULAN**

Keharusan untuk tunduk pada yuridiksi Amerika Serikat saat menggunakan dolar dan juga sanksi yang sering diberikan oleh Amerika Serikat kepada negara lain, membuat Tiongkok melakukan de-dollarisasi. De-dollarisasi mulai dilakukan Tiongkok dengan mengajak mitra dagang untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat dalam transaksi antar negara dan mengutamakan penggunaan mata uang nasional. Tidak hanya mengurangi penggunaan dolar, Tiongkok juga gencar menginternasionalisasikan mata uangnya, yuan melalui berbagai inisiatif seperti *Belt and Road Initiative* dan bursa berjangka minyak mentah yang berdominasi yuan di Shanghai.

Berdasarkan Teori Stabilitas Hegemoni dari Robert Gilpin, untuk mewujudkan serangkaian kepentingan suatu negara harus menjadi negara hegemoni karena sistem dibentuk berdasarkan kepentingan negara terkuat didalamnya. Hal ini yang dilakukan Tiongkok yaitu dengan merubah rezim moneter internasional yang beberapa decade didominasi oleh dolar Amerika Serikat. De-dollarisasi yang dilakukan Tiongkok dipandang sebagai momentum Tiongkok untuk menggantikan posisi Amerika Serikat ditengah perang dagang yang sedang terjadi. Meski dolar masih mendominasi pasar global saat ini, jika penggunaan dolar globalnya terus menurun, besar kemungkinan hegemoni Amerika Serikat juga akan mengalami penurunan. Jika pengaruh dolar menurun, mata uang lain dapat mengisi peran yang selama ini dimainkan oleh dolar Amerika Serikat, terutama yuan Tiongkok.

## REFERENSI

- Anggara, A. R, "Strategi Rusia Menghadapi Sanksi Ekonomi Amerika Serikat dan Uni Eropa (2014-2015)", *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(3), Hal: 995–1010, 2018.
- Arif, A. I., Jakarta, "Membedah Jejak Tiongkok di Kepemilikan Obligasi AS". CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190517163151-1773285/membedah-jejak-china-di-kepemilikan-obligasi-as>, diakses pada tanggal 17 Mei 2019.
- Badiri, I., "Analisis Ekonomi Politik Internasional dalam Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok". *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)* 2(2), Hal : 147–157, 2020. <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26070>
- Batubara, E., "Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat Terhadap Republik Rakyat Tiongkok", *JOM FISIP*, 6(2), Hal : 1–13, 2019.
- BEI, "Surat hutang (Obligasi)". Bursa Efek Indonesia. <https://idx.co.id/produk/surat-utang-obligasi>, diakses pada 1 April 2021.
- Bestari, P. N., Jakarta, "Fakta Yuan Digital, Uang Digital Tiongkok Lawan Bitcoin", CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210305154506-37-228163/fakta-yuan-digital-uang-digital-tiongkok-awal-bitcoin>, diakses pada Tanggal 05 Maret 2021.
- Lily, Drinkwater., "The Belt and Road Initiative, LehmanBrown International Accountants dalam <https://www.lehmanbrown.com/wp%0A%0Acontent/uploads/2017/08/The%0A-%0ABelt%0A-%0Aand%0A-%0ARoad%0A-%0AInitiative.pdf>, diakses pada tanggal 16 Desember 2020.
- Burhan, A. F., Jakarta Selatan, "Yuan Digital Dinilai Akan Saingi Alipay dan WeChatpay", [katadata.co.id](http://katadata.co.id), dalam <https://katadata.co.id/desysetyaowati/digital/60863a9ded667/yuan-digital-dinilai-akan-saingi-alipay-dan-wechat-pay>, diakses pada 26 April 2021.
- CNN indonesia, Jakarta, "Beda Yuan Digital Tiongkok dengan Bitcoin dan Uang Tunai", dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/202012081414115-185-579468/beda-yuan-digital-tiongkok-dengan-bitcoin-dan-uang-tunai>, diakses pada 08 Desember 2021.
- CNN indonesia, Jakarta, "Sayonara Dolar, Kini RI-Tiongkok Transaksi pakai Yuan dan Dolar", dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200930143722-78-552730/sayonara-dolar-kini-ri-tiongkok-transaksi-pakai-yuan-rupiah>, diakses pada 30 September 2021.

- Collegian, Zhou Xiaochuan, "Combating the Dollarization of Global Economies with China's Digital Yuan". *The Savvy Student*. [https://www.collegian.psu.edu/the\\_savvy\\_student/combating-the-dollarization-of-global-economies-with-china-s-digital-yuan/article\\_9e025d6c-280d-11eb-811c-b7210627cfd.html](https://www.collegian.psu.edu/the_savvy_student/combating-the-dollarization-of-global-economies-with-china-s-digital-yuan/article_9e025d6c-280d-11eb-811c-b7210627cfd.html), diakses pada 16 November 2020.
- Egindo.co, "Tiongkok Bangun "Cadangan bayangan" Lawan Ketergantungan pada Dolar AS". dalam <https://doi.org/https://www.egindo.co/tiongkok-bangun-cadangan-bayangan-lawan-ketergantungan-pada-dolar-as>, diakses pada 2 Juni 2020.
- Fauzia, M., Beijing, "Tiongkok bakal Rilis Yuan Digital, Layanan Cadangan Untuk Alipay dan WeChat pay", *Kompas.com*, dalam [https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/money/read/2021/03/27/141200526/tiongkok-bakal-rilis-yuan-digital-layanan-cadangan-untuk-alipay-dan-wechat?amp\\_js\\_v=a6&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16242952855262&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%251%24s](https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/money/read/2021/03/27/141200526/tiongkok-bakal-rilis-yuan-digital-layanan-cadangan-untuk-alipay-dan-wechat?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16242952855262&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%251%24s), diakses pada Tanggal 27 Maret 2021.
- Fitriani, A., "Petro-yuan Bantu Tiongkok dan Rusia Singkirkan Dolar AS Dalam perdagangan Minyak", *Republik Merdeka*, dalam <https://dunia.rmol.id/real/2018/03/28/332778/Petro-yuan-Bantu-Tiongkok-Dan-Rusia-Singkirkan-Dolar-AS-Dalam-Perdagangan-Minyak>, diakses pada Tanggal 28 Maret 2018.
- Gilpin, R., "*War and Change in World Politics*". Cambridge University Press, 1981. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511664267>
- Gilpin, R., "*The Political Economy of International Relations*". Princeton University Press, 1987.
- Hasugian, M. R., Jakarta, "Presiden Xi Klaim 150 Negara Ikut Belt and Road Initiative". *Tempo.co*, <https://dunia.tempo.co/read/1200126/presiden-xi-klaim-150-negara-ikut-belt-and-road-initiative>, 29 April 2019.
- Jayakarya, E., "Internasionalisasi Mata Uang a la Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*", 7 (01), 17–30, 2014.
- Keohane, R. O., "*After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*". Princeton University Press, 1984.
- Khoiriyah, K., "Tiongkok: Analisa Balance Of Power dalam Perang Dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok pada Tahun 2018". *Journal of International Relations*, 6(4), Hal : 491–497, 2020.
- Rafie, B. T., Beijing, "Agustus, Cadangan Devisa Tiongkok naik menjadi US\$ 3,165 triliun". *Kontan.co.id* dalam <https://internasional.kontan.co.id/news/agustus-cadangan-devisa-tiongkok-naik-menjadi-us-3165-triliun>, diakses pada Tanggal 8 September 2020.

- Krasner, S. D., "*Regime International*" Cornell University Press, 1983.
- Lake, D. A., "*Power, Protection and Free Trade*". Cornell University Press, 1988.
- Lestari, R., Jakarta, "AS-Tiongkok Makin Panas, Internasionalisasi Yuan Bidik ASEAN", *Bisnis.com*, dalam <https://m.bisnis.com/kabar24/read/20200713/19/1265040/as-tiongkok-makin-panas-internasionalisasi-yuan-bidik-asean>, diakses pada Tanggal 13 Juni 2020.
- Lu, M., "Charting America's Debt: \$27 Trillion and Counting", *Visual capitalis.com*, dalam <https://www.visualcapitalist.com/americans-debt-27-trillion-and-counting>, diakses pada Tanggal 30 Oktober 2020.
- Mangkuto, W. S., Jakarta, "Tiongkok Lobi Rusia Campakkan Dolar AS, Setujukah Putin?", *CNBC Indonesia*, dalam <https://doi.org/cindonesia.com/market/20191125083535-17117633/tiongkok-lobi-rusia-campakkan-dolar-as-setujukah-putin> diakses pada 25 November 2019.
- Masitoh, D., "Upaya Pertahanan Hegemoni Amerika Serikat Dalam Menghadapi Dominasi Tiongkok Pada Periode Presiden Barack Obama". Skripsi, Fakultas Psikologi Sosial dan Budaya, Hubungan Internasional, UIN, Yogyakarta, 2018.
- Mathews, A. J. dan S. M., "Tiongkok: The Emergence of the Petro Yuan and the Challenge to US Dollar Hegemony". *The Asia-Pacific Journal*, 16(22), Hal : 1–12, 2018.
- Meiliza, F., "Upaya Amerika Serikat Terhadap Denuklirisasi Korea Utara Tahun 2017-2018". Skripsi, FISIP, Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Muafi, "Kepentingan Tiongkok memasukkan yuan ke Special Drawing Right (SDR)". *Ejurnal Hubungan Internasional*, 07(01), 245–260, 2019. [ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id).
- Muhammad, I., Teheran, "Kena Sanksi Lagi dari AS Iran Minta Bantuan Dunia". *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/global/read/2020/09/20/164019870/kena-sanksi-lagi-dari-as-iran-minta-bantuan-dunia>, diakses pada Tanggal 20 September 2020.
- Nadya, A. D., "Tiongkok Sebagai Pemimpin Dunia Baru Melalui Investasi Di Negara-negara di Dunia". *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2(2), Hal : 202–213, 2018, dalam <http://dx.doi.org/10.33541/japs.v3i1.1070> %0D
- Overholt, H. W. dkk, "*Renminbi Rising a New Global Monetary Sistem Emerges*". Fung Global Institute Limited, 2016.

Platonova, N. I., "De-dollarization as a Manifestation of the Transition of International Monetary Relations to Polycentrism". *107*, Hal : 72–75, 2019.

Pransuamitra, P. A., Jakarta, "Aksi "Buang Dolar" Tiongkok Tak Ada Apa-apanya Ketimbang Rusia!", CNBC Indonesia, dalam <https://doi.org/https://www.cnbcindonesia.com/market/20200714144712-17-172588/aksi-buang-dolar-tiongkok-tak-ada-apa-apanya-ketimbang-rusia>, diakses pada Tanggal 14 Juli 2020.

Pransuamitra, P. A., Jakarta, "Tiongkok Pegang Surat Utang AS Rp 14,400 T Buang Berapa?", CNBC Indonesia. dalam <http://www.cnbcindonesia.com/market/20200714121658-17-172529/tiongkok-pegang-surat-utang-as-rp-14400-t-mau-buang-berapa>, diakses pada Tanggal 14 Juli 2020.

Rafie, T. B., Beijing, "Tiongkok Kembali Jual Surat Utang AS, Analisis: Ini Langkah Untuk Melindungi diri". Kontan,co.id. dalam [https://amp-konta-co-id.cdn.ampproject.org/v/samp.konta.co.id/news/tiongkok-kembali-jual-surat-utang-as-analisis-ini-langkah-untuk-melindungi-diri?amp\\_js\\_v=a6&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D3aoh=16246105210114&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%251%24s](https://amp-konta-co-id.cdn.ampproject.org/v/samp.konta.co.id/news/tiongkok-kembali-jual-surat-utang-as-analisis-ini-langkah-untuk-melindungi-diri?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D3aoh=16246105210114&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%251%24s), diakses pada Tanggal 20 November 2020.

Ramadhani, T. E., "Internasionalisasi Yuan: Transisi Tiongkok Menuju Kekuatan Hegemoni". *Global*, 13(01), Hal : 21–37, 2011

Reuters, Beijing, ."Tiongkok Will Pursue Forex reserves Diverdifikasi in Prudent Way", dalam <https://www.reuters.com/article/us-tiongkok-economy-idUSKCN1UNOAX>, diakses pada Tanggal 20 Januari 2021.

Rezieq, R., "Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cadangan Devisa Indonesia". *Jurnal Equilibrium*, 03(02), 2006.

Rianti, E., Jakarta, futures minyak Tiongkok bersaing dengan WTI dan Brent. *Bisnis.com*. dalam <https://m.bisnis.com/market/read/20180326/94/754340/futures-minyak-tiongkok-bersaing-dengan-wti-dan-brent>, diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

Santoso, D. D., "Stabilitas Hegemoni Amerika Serikat di tengah hadirnya pengaruh Tiongkok pasca lahirnya inisiasi One Belt One Road". Skripsi, FISIP, Hubungan Internasional, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.

Sebayang, R., Jakarta, "Perang Dagang, Tiongkok Masih Punya Kartu As: Obligasi Negara AS", CNBC Indonesia. dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180405111528-17-9787/perang-dagang-tiongkok-masih-punya-kartu-as-obligasi-negara-as>, diakses pada Tanggal 05 April 2018.

Sebayang, R., "Ini Alasan Negara-Negara Besar Dunia Mulai Buang Dollar", CNBC

Indonesia, dalam  
<https://www.cnbcindonesia.com/investment/20191101111757-21-111935/ini-alasan-negara-negara-besar-dunia-mulai-buang-dolar>, diakses pada Tanggal 06 Agustus 2020.

Sebayang, R., Jakarta, "Tiongkok "Buang" Dollar As & Peluru "Belt and Road Initiative", CNBCIndonesia, dalam  
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200714100334-17-172473/china-buang-dolar-as-peluru-belt-and-road-initiative>, diakses pada tanggal 01 November 2019.

Sebayang, R., Jakarta, "Yuan Raja Mata Uang Dunia, Masih jauh Pemirsah!", CNBC Indonesia, dalam  
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200903104451-17-184-072/yuan-raja-mata-uang-dunia-masih-jauh-pemirsah>, diakses pada tanggal 03 September 2020.

Sekarwati, S., Jakarta, "14 Pejabat Tinggi di Tiongkok Kena Sanksi Amerika Serikat", Tempo.co.id, dalam  
[https://dunia.tempo.co.cdn.ampproject.org/v/s/dunia.tempo.co/amp/1412536/14-pejabat-tinggi-di-tiongkok-kena-sanksi-amerika-serikat?amp\\_js\\_v=a6&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16243738091672&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fdunia.tempo.co%2F14-pejabat-tinggi-di-tiongkok-kena-sanksi-amerika-serikat](https://dunia.tempo.co.cdn.ampproject.org/v/s/dunia.tempo.co/amp/1412536/14-pejabat-tinggi-di-tiongkok-kena-sanksi-amerika-serikat?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16243738091672&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fdunia.tempo.co%2F14-pejabat-tinggi-di-tiongkok-kena-sanksi-amerika-serikat), diakses pada tanggal 08 Desember 2020.

ShFE.com, "Shanghai Futures Exchange",  
<http://www.shfe.com.cn/en/aboutus/introduction/overview/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021.

Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". *Alfabeta*, 2009

Ulya, F. N., Beijing, "Bank Sentral Tiongkok Makin Gencar Sebarkan Yuan Digital". Kompas.com, dalam  
[https://amps-kompas.com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/money/read/2021/02/16/110600726/bank-sentral-tiongkok-makin-gencar-sebarkan-yuan-digital?amp\\_js\\_v=a6&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16243230603805\\$referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf-Dari%251%24s](https://amps-kompas.com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/money/read/2021/02/16/110600726/bank-sentral-tiongkok-makin-gencar-sebarkan-yuan-digital?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16243230603805$referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf-Dari%251%24s), diakses pada 16 Februari 2021.

Wan, R., "Sejarah Dollar AS Menjadi tata Uang Dunia", Kompasiana.Com.  
<https://www.kompasiana.com/ronaldwan/5b72951643322f6c8c785b78/sejarah-dollar-as-menjadi-mata-uang-dunia>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.

Winarno, T., "Dedolarisasi dan Yuanisasi", *Investor.id*.  
<https://investor.id/opinion/dedolarisasi-dan-yuanisasi>, diakses pada tanggal 25 September 2019.

- Witono, A., "Upaya Brics Dalam Menghadapi Hegemoni Amerika Serikat Di Perekonomian Global Melalui Lembaga Keuangan Internasional 2013-2014". Skripsi, FISIP, Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta, 2015.
- Yilmaz, S., "State, Power, and Hegemony". *International Journal of Business and Social Science*, 1(3), Hal : 192–205, 2010.
- Zuraya, N., Beijing, "Yuan Bakal Seajar dengan Dolar Jadi mata Uang Cadangan", *Republika.co.id*, dalam <https://m.republika.co.id/berita/qg6ezq383/yuan-bakal-sejajar-dengan-dolar-as-jadi-mata-uang-cadangan>, diakses pada tanggal 05 September 2020.